



ASYIKpublisher

REFLEKSI RUU HIP
**Komunisme Tidak
Pernah Mati**

Pancasila,
**Komunisme dan
New normal**

RUU HIP
**Bukan Ditunda,
Tapi Tolak!**

Catatan Harian



Ahmad Syaikhun

[MEI - JULI 2020]

Catatan Harian 
Ahmad Syaikh
[MEI - JULI 2020]

Penulis:
Ahmad Syaikh

Editor:
Erwyn Kurniawan

Desain Grafis:
Firdaus Usman

Cetakan Ke-I
Juli 2020

Diterbitkan oleh:
Asyikpublisher

Percetakan:
Asyikpublisher

ISBN:
978-979-25-2678-3

Daftar Isi

Pengantar Wakil Ketua MPR RI 2019-2024.....	v
Pengantar Presiden PKS.....	vii
Pengantar Ketua Fraksi PKS DPR RI.....	x
Pengantar Penulis.....	xii

Catatan Harian:

• Refleksi RUU HIP: Komunisme Tidak Pernah Mati	1
• Pancasila, Komunisme dan New Normal	6
• RUU HIP: Bukan Ditunda, Tapi Tolak!.....	10
• Sikap Kami Jelas: Tolak RUU HIP Sejak Awal!	13
• RUU HIP Tak Ditarik dari Prolegnas 2020: Kami Protes!	16
• Menerima Aspirasi GMBI soal RUU HIP	19
• RUU HIP: Wakil Rakyat Tak Boleh Berjarak	20
• Sikap Tegas PKS di Paripurna DPR: Cabut RUU HIP dari Prolegnas 2020.....	24
• RUU HIP Diganti RUU BPIP: Jangan Bermain Api!.....	29
• Pemimpin di Masa Krisis	32
• Menanti Jawaban Pemerintah	35
• New Normal yang Mengkhawatirkan.....	38
• TAPERA: Beban Baru Rakyat di Tengah Pandemi Corona	42
• Bersepeda, Ikhtiar Terhindar Corona.....	48
• Canda.....	51
• Belajar dari Liverpool	55
• Liverpool, Ideologi dan Hari Keluarga Nasional.....	57
• Memimpin Rapat BAKN, Mengkaji Pengelolaan Subsidi Minyak dan Gas.....	61
• Menangkap Obsesi KH. Hilmi Aminuddin	64
• Saatnya Kembali ke Koperasi.....	68

Rilis Media

- Fraksi PKS: TAP MPRS No. XXV/1966 Harusnya Jadi Landasan dalam RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) 72
- Terima Ulama Kabupaten Bekasi Tolak RUU HIP, Syaikh: Kami akan Terus Perjuangkan!..... 77
- Ahmad Syaikh Desak Pemerintah Setop Relaksasi PSBB di Bandara..... 79
- PKS: “New Normal, OJOL Boleh Bawa Penumpang dengan Protokol Kesehatan..... 86
- Kemenhub Hapus Batasan 50% Jumlah Penumpang, Syaikh: Wabah Covid-19 Belum Selesai! 91
- BPKP Berusia 37 Tahun, Syaikh: Optimalkan Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19 96
- Syaikh: PP TAPER A Jadi Beban Baru Rakyat di Tengah Pandemi Corona..... 101
- Syaikh Kritik Pembebasan Lahan Bendungan Ibu Kota Negara: Setop, Rakyat sedang Susah! 109
- PKS Bergerak Cepat Bantu Korban Banjir ROB Pesisir Karawang 115
- Kunjungi Korban Banjir Rob di Karawang, Syaikh: Pemda Harus Relokasi Warga..... 117
- Soal SIM Seumur Hidup, Ini Kata Anggota DPR RI..... 121
- Anggota DPR Upayakan SIM Berlaku Seumur Hidup..... 124
- Terjadi Anomali Subsidi, BAKN DPR RI Minta Masukan Pakar... 127
- Ojol Jihad di Jalanan, PKS Jihad di DPR Angkat Ojol Jadi Transportasi Umum 130
- Temuan BPK Berpotensi Rugikan Negara, Syaikh Pertanyakan Kinerja Tiga Kementerian 133

Pengantar Wakil Ketua MPR RI 2019-2024

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

DUA BULAN TERAKHIR, panggung politik nasional disesaki dengan isu Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Berbagai aksi penolakan mengemuka. Dari berbagai elemen masyarakat dan di berbagai daerah.

Di Gedung Parlemen Senayan, kita pun dapat melihat sepak terjang Wakil Rakyat terkait ini. Mana yang partainya mendukung dan menolak sejak awal.

Kehadiran buku Catatan Harian ke-4 karya sahabat saya, Ustadz Ahmad Syaikh ini sangat tepat momentumnya. Isi buku ini banyak menyoroti soal RUU HIP. Berisikan rangkaian gagasan, ide dan sikap tegas beliau.

Publik perlu mengetahui ini. Sebab hingga hari ini, fitnah terhadap PKS dalam pusaran isu ini masih terus terjadi. Dengan hadirnya buku ini, maka ada jejak literasi yang tak terbantahkan. Bahwa sejak awal sikap PKS di parlemen sangat jelas, yakni menolak RUU HIP. Berikut dengan alasan filosofis, sejarah hingga akademisnya.

Saya mengucapkan *jazakumullah Khoiron* kepada Ustadz Ahmad Syaikhu. Sumbangsihnya melalui buku ini membuat saya yakin bahwa Pancasila akan tetap terjaga keaslian dan kesaktiannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 14 Juli 2020

Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA
Wakil Ketua MPR RI 2019-2024

Pengantar Presiden PKS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

SAYA SUNGGUH BERBAHAGIA ketika membaca buku Saudara Ahmad Syaikh ini. Sebab, buku tersebut menjadi bukti respons beliau, terhadap apa yang saya sampaikan kepada para Anggota Legislatif di berbagai kesempatan.

Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten adalah etalase partai. Wajah PKS tercermin dari tingkah laku mereka. Karena itu saya kerap meminta untuk selalu menjadi duta kebaikan bagi bangsa dan negara.

Mereka harus mampu menjelaskan ideologi sekaligus mentransformasi tujuan PKS dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada masyarakat luas. Dan itu bisa dilakukan melalui kerja-kerja politik di parlemen.

Saya juga tekankan, PKS adalah salah satu entitas bangsa dan negara Indonesia yang lahir di masa modernitas yakni pada 1999. Karena itu, PKS selaras dengan keindonesiaan dan modernitas. PKS tidak lahir dari ruang hampa, PKS lahir dari rahim Reformasi di era modern sehingga kompatibel dengan keindonesiaan dan kemodernan.

Oleh sebab itu, Para Wakil Rakyat dari PKS di parlemen tidak hanya fasih membicarakan tentang keislaman, tapi juga hal-hal yang kekinian dan modern terutama yang menyangkut kepentingan hidup rakyat banyak.

Buku ini, meski terlihat sederhana, tapi tampak jelas menjawab apa yang saya sampaikan. Saudara Ahmad Syaikhul sejahat ini telah sukses memainkan perannya sebagai etalase partai. Beliau telah menterjemahkan pesan-pesan saya melalui jejak langkahnya sebagai Anggota DPR. Yakni menjadi duta kebaikan dan fasih berbicara tak hanya keislaman, namun juga keindonesiaan dan kepentingan rakyat banyak, terutama saat pandemi Corona sedang melanda kita.

Buku ini juga mampu menjelaskan sejelas-jelasnya posisi partai dalam pusaran isu mutakhir. Salah satunya soal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang membetot perhatian publik. Melalui buku ini, Saudara Ahmad Syaikhul dapat menunjukkan sikap tegas PKS, yakni menolak sejak awal RUU HIP. Berikut dengan argumentasi sejarah, filosofis dan empiris.

Anggota DPR harus bisa menjelaskan secara gamblang soal RUU HIP ini. Apa tujuannya, isinya hingga kronologis pengajuannya. Sebab di media arus utama dan sosial media, bertebaran berita tak benar soal RUU HIP dan PKS.

RUU HIP ini semula dimaksudkan untuk menguatkan posisi Pancasila sebagai dasar negara. Mencermati itu, tentu saja PKS menyambut baik kehadiran RUU HIP tersebut. Sebab ini sejalan dengan cita-cita PKS selama ini. PKS menginginkan penguatan posisi Pancasila. Dimulai pada tingkat filosofi (dasar pemikiran) dan doktrin (ajaran), serta pada tingkat praksis (pelaksanaan).

Ketika draft RUU HIP diterima, sontak kami kaget. Karena banyak hal yang tak sesuai dengan maksud dan tujuan semula. Lalu kami menyampaikan masukan agar diperbaiki, antara lain:

1. Meminta TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Komunisme, Marxisme dan Leninisisme dimasukkan dalam pertimbangan.
2. Meminta dihapuskannya Trisila dan Ekasila.
3. Meminta konsep “Ketuhanan Berkebudayaan” tidak menggantikan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pimpinan Panja menyetujui ketiga masukan tersebut. Maka dari itu, PKS tidak keberatan RUU HIP dilanjutkan prosesnya.

Namun dalam perjalanannya, Pimpinan Panja ternyata tidak memperbaiki RUU HIP dengan cara memasukkan ketiga usulan PKS. Dengan demikian, PKS tegas menolak untuk menandatangani hasil kerja Panja. Saat di Badan Musyawarah pun, PKS menolak melanjutkan pembahasan RUU HIP di rapat paripurna.

Dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV Tahun 2019-2020, Kamis (16/7), kami menyampaikan penolakan dan meminta agar RUU dicabut dari Prolegnas 2020. Sikap itu disampaikan oleh KH. Buchori Yusuf.

Kehadiran buku ini yang merekam jejak aktivitas Wakil Rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk soal RUU HIP, akan semakin membuka tabir dibalik isu ini. Buku ini betul-betul hadir di saat yang tepat.

Semoga beliau istiqomah mengemban amanah berat ini. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D

Presiden PKS

Pengantar Ketua Fraksi PKS DPR RI

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

SAYA tak pernah lelah mensyiarkan Visi PKS di Parlemen yaitu menjadi yang terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang berkarakter, maju, adil dan sejahtera. Untuk itu Fraksi PKS DPR menetapkan garis perjuangan bagi setiap anggotanya, harus pro-rakyat (berpihak pada kepentingan rakyat), pro-umat (menjaga hak beragama umat beragama apapun), dan pro-pengokohan nasionalisme Indonesia (menjaga karakter dan identitas bangsa).

Dengan seluruh amanah tersebut, para anggota Fraksi PKS harus tampil kreatif, inovatif, dan atraktif. Tentunya, tetap dengan mengedepankan substansi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Kerja-kerja kita di parlemen harus cepat, cerdas, dan terarah agar anggota dewan PKS selalu terdepan. Maksud dari terdepan adalah orang baru berpikir kita sudah melakukan, giliran orang melakukan kita sudah beralih melakukan hal lain yang lebih inovatif. Itulah ciri khas Fraksi PKS DPR RI.

Fraksi PKS juga berkomitmen untuk lebih aktif menjaring aspirasi rakyat melalui forum terbuka atau

penerimaan aspirasi yang semakin intensif setiap pekan. Jika periode lalu kita buka Hari Aspirasi Rakyat setiap Selasa, maka periode sekarang menjadi dua hari setiap hari Selasa dan Jum'at.

Pada titik inilah, hadirnya buku yang ditulis Ustadz Ahmad Syaikhul ini menjadi sangat penting. Sebab isi buku beliau mengkonfirmasi kerja-kerja nyata kita selama menjadi Anggota DPR, sesuai visi dan misi kita di Parlemen.

Selain itu, buku ini juga seperti cermin partai terkait isu-isu kekinian. Apa dan bagaimana sikap Fraksi PKS di parlemen dalam merespons isu, bisa tercermin di buku ini. Contoh soal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Saudara Ahmad Syaikhul lewat buku ini secara gamblang menjelaskan posisi PKS. Runut dan sistematis. Juga berbasis argumentasi yang kuat.

Saya bangga dan mengapresiasi Ustadz Ahmad Syaikhul yang dengan cepat mampu memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Semoga buku ini akan menjadi bukti bahwa kita bersama rakyat. Sebab, yang terucap akan menguap dan yang ditorehkan dalam tulisan akan kekal abadi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 16 Juli 2020

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A

Ketua Fraksi PKS DPR RI 2019-2024

Pengantar Penulis

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

ALHAMDULILLAH, untuk kali keempat, buku Catatan Harian terbit. Buku ini hadir di tengah kita masih dalam masa pandemi Corona. Juga saat isu Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menguat dan memunculkan protes dari banyak kalangan.

Membaca buku ini, kita akan mengetahui tentang apa dan bagaimana RUU HIP. Yang pada ujungnya membuat kita paham mengapa ulama dan umat menolak keras.

Bersyukur saya berada dalam partai yang sejak awal menyuarakan ketidaksetujuannya pada RUU HIP ini. Penolakan ini sejalan dengan aspirasi konstituen saya di Dapil VII Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Di buku ini, rekam jejak saya menyuarakan aspirasi masyarakat terkait RUU HIP bisa terlihat. Itulah mengapa dalam setiap reses, saya selalu membagikan buku Catatan Harian. Agar konstituen saya dapat membaca langsung apa yang saya lakukan sebagai wakil mereka di DPR.

Semoga buku ini kian menyadarkan kita bahwa komunisme itu tidak pernah mati sebagai sebuah ideologi. Sehingga kita tetap waspada agar NKRI dan Pancasila terus terjaga. Semoga Allah melindungi kita dan bangsa ini. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bekasi, 14 Juli 2020

Ahmad Syaikh

Refleksi RUU HIP: Komunisme Tidak Pernah Mati

Banyak orang berpikir komunisme telah mati. Seiring berakhirnya Perang Dingin, runtuhnya Tembok Berlin, dan bubarnya Uni Soviet. Ditambah Mikail Gorbachev menggaungkan *glasnost* (keterbukaan politik) dan *perestroika* (restrukturisasi ekonomi), di negeri asal komunisme.

HINGGA KINI, masih banyak yang berpendapat demikian. Nafas komunisme telah berakhir. Jasadnya terkubur dalam-dalam di liang lahat peradaban dunia.

Di Indonesia, mereka yang berpikiran seperti itu juga ada. Bahkan banyak. Mereka menyebut, komunis adalah ideologi yang sudah bangkrut dan sudah mati di seluruh dunia. Di Republik Rakyat Cina sekalipun, ideologi komunis hanya tinggal di atas kertas. Namun di Indonesia masih banyak yang termakan isu soal kebangkitan komunis.

Benarkah komunisme sebagai ideologi sudah mati?

Sosiolog Inggris, Anthony Giddens, menyatakan bahwa komunisme dan sosialisme merupakan sebuah hantu yang terus membuntuti eksistensi paham liberalisme dan kapitalisme. Komunisme nyatanya cenderung bermetamorfosis menjadi sebuah pergerakan modern yang justru lebih masif dan mengerikan.

Dewasa ini, mencermati dinamika yang ada, pemikiran bahwa komunisme sudah mati bisa terbantahkan. Kita ingat dengan usulan permintaan maaf kepada PKI dan rekonsiliasi? Kita ingat dengan keberanian seorang tokoh yang menyatakan "Saya bangga jadi anak PKI?". Kita ingat dengan usaha memutarbalik sejarah kelam pengkhianatan PKI? Mereka dipropagandakan sebagai korban, orang-orang yang terzalimi.

Belakangan ini, jika kita betul-betul menepi kondisi bangsa dan negara, situasinya mirip dengan kondisi jelang 30 September 1965. Setidaknya itu

yang diungkapkan Sastrawan Taufik Ismail. Dia menilai kondisi Indonesia seperti situasi kebangkitan Partai Komunis Indonesia. "Situasi minggu-minggu dan bulan-bulan terakhir ini, mirip situasi pada tahun 62, 63, 64, dan 65," ungkapnya dalam sambutannya dalam deklarasi Alumni Universitas Indonesia Bangkit untuk Keadilan di Perpustakaan UI, Jumat, 27 Januari 2017.

Akhir-akhir ini kita memang patut prihatin. Seperti ada anasir-anasir dari pihak tertentu yang ingin memecah belah bangsa. Ada upaya adu domba. Menjelekkan agama, menghujat dan menghina tokoh agama. Dan seterusnya.

Terkini, kita terkejut dengan adanya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). RUU yang termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024 ini menuai kritik lantaran tak memasukkan TAP MPRS soal larangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

Jika merujuk draf RUU HIP, ada 58 pasal dan delapan peraturan yang dijadikan konsideran. Anehnya, peraturan yang dijadikan konsideran itu justru tidak berkaitan dengan Pancasila. Dan TAP MPRS XXV/1966 tentang pelarangan penyebaran ideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme justru tidak jadi konsiderannya.

Prof. Jimmly Asshiddiqi menegaskan, TAP MPRS mesti menjadi roh hierarkis yang layak diposisikan sebagai dasar pembentukan undang-undang, meng-

ingat kedudukan yang tidak bisa serampangan dalam aturan Indonesia sebagai negara hukum. Karena itu harus dimasukkan dalam RUU HIP.

Suara-suara penolakan juga mulai terdengar. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta DPR untuk melakukan kajian yang mendalam terkait draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Badan Legislasi (Baleg) yang ditugaskan untuk membahasnya juga diminta untuk tidak terburu-buru dalam pembahasannya nanti.

GP Ansor sendiri memiliki empat catatan terkait RUU HIP. Dua di antaranya yakni, *pertama*, tak dicantumkan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, menjadi landasan RUU HIP.

Kedua, melihat banyaknya perdebatan dari RUU HIP. Salah satu perdebatan yang timbul adalah RUU itu terkesan sebagai upaya terselubung eks PKI dan kelompoknya untuk balas dendam sejarah yang menimpa mereka. Untuk itu, dibutuhkannya diskusi dan masukan dari berbagai kalangan sebelum dimulainya pembahasan RUU HIP.

Di tengah pandemi Corona yang belum berakhir, lolosnya RUU HIP dalam pembahasan di DPR ini sungguh memprihatinkan. Sikap Fraksi PKS sendiri sudah jelas. Terang-benderang. Menolak RUU HIP

ini jika tak memasukkan TAP MPRS di atas dalam konsiderannya.

Hari ini, ketika kita justru tidak menjadikan TAP MPRS XXV/1966 ke dalam RUU HIP, kita seperti sedang mengkhianati perjuangan Para Pendiri Bangsa. Kita seolah melupakan perjuangan Soekarno, Mohammad Yamin, Dr. Soepomo. Juga Mohammad Hatta, KH. Wahid Hasjim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, dan Mr. AA Maramis. Mereka inilah yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato Soekarno tersebut, dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Saya teringat pesan Mohammad Natsir tentang agama dan komunisme yang ditulis pada Maret 1957. Kata beliau:

Biarpun Digodog

*Apakah mungkin minyak dan air dipersatukan,
meskipun digodog dan diudek-udek?*

*Waspadalah terhadap politik “menyodorkan
tangan” yang palsu!*

*Waspadalah terhadap “serigala berbulu kibas yang
hendak dimasukkan sekandang dengan ternak!”*

Hasbunallah wani’malwakil. •



Pancasila, Komunisme dan New Normal

Hari ini, 1 Juni bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Sudah genap 75 tahun usia ideologi bangsa kita, sejak kali pertama Soekarno, M. Yamin, Dr. Soepomo dan lainnya, menggagas dalam sebuah pidato yang menyejarah. Ironisnya, umur yang panjang ternyata berbanding terbalik dengan kedekatan kita bersama Pancasila.

PADA 12 MEI LALU, sekitar 18 hari sebelum kita memperingati Hari Lahir Pancasila, pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideo-

logi Pancasila (HIP) memasuki babak baru. RUU ini disahkan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Selanjutnya, DPR dan pemerintah bakal mendalami materi muatan dalam draf RUU HIP ini.

Banyak yang tak mencermati isi RUU ini. Padahal, RUU ini tidak menjadikan Ketetapan (TAP) MPRS No.XXV Tahun 1966 sebagai landasan. Isi TAP ini teramat penting. Yakni tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atas Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) sejak awal menolak keras sejak rumusan RUU HIP yang tidak menjadikan TAP MPRS XXV/1966 sebagai landasan. TAP MPRS XXV/1966 hingga kini belum dicabut, sehingga keberadaan dan keberlakukannya masih diakui. Karena itu, Ketika RUU HIP akan dijadikan aturan, seharusnya mencantumkan Tap MPRS XXV/1966 sebagai acuan agar posisinya jelas terhadap ideologi komunisme.

Tidak dijadikannya TAP MPRS tersebut sebagai landasan dan sama sekali tidak dimasukkan dalam RUU HIP memunculkan keanehan. Kita terkesan sedang memberi ruang bagi komunisme. Juga seakan kita sedang mengalami amnesia sejarah. Padahal, komunisme telah terbukti ingin mengubah ideologi

negara menjadi ideologi terlarang. TAP MPRS XXV/1966 merupakan esensi penting dan ruh dari ideologi negara Pancasila. Sekaligus ikhtiar kita menjaga orisinalitas Pancasila dari pengaruh haluan kiri dan kanan, seperti sosialis komunis dan kapitalis liberalis.

Dalam bahasa kekinian, menjadikan TAP MPRS XXV/1966 sebagai landasan RUU HIP jadi upaya kita untuk menjaga Pancasila tetap normal. Maksudnya, ketika Soekarno kali pertama memperkenalkan istilah Pancasila dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Jakarta, nilai-nilai yang disampaikan bertentangan dengan komunisme. Terutama saat berbicara soal Ketuhanan, hal yang diharamkan oleh ideologi komunis.

Hari ini, ketika kita justru tidak menjadikan TAP MPRS XXV/1966 ke dalam RUU HIP, kita seperti sedang mengkhianati perjuangan Para Pendiri Bangsa. Kita seolah melupakan perjuangan Soekarno, Mohammad Yamin, Dr. Soepomo. Juga Mohammad Hatta, KH. Wahid Hasjim, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, KH. Agus Salim dan Achmad Soebardjo. Mereka inilah yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato Soekarno tersebut, dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Normalnya, Pancasila itu bersikap hitam putih

dengan komunisme. Seperti yang diinginkan *The Founding Fathers* kita. Namun, dengan tidak dijadikannya TAP MPRS sebagai landasan RUU HIP, kita seakan membawa Pancasila ke arah New Normal. Kondisi dimana Pancasila tidak bersikap tegas terhadap ideologi komunisme.

Kita berharap, ini tidak terjadi. Masih tersedia waktu bagi kita untuk mengubahnya. Dan Hari Lahir Pancasila ini harus jadi momentum bagi semua pihak, untuk menjaga dan merawat Pancasila.

Selamat Hari Lahir Pancasila. •



Normalnya, Pancasila itu bersikap hitam putih dengan komunisme. Seperti yang diinginkan *The Founding Fathers* kita.

RUU HIP: Bukan Ditunda, Tapi Tolak!

Gelombang protes terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terus membesar. Datang dari berbagai kalangan. Tuntutan mereka jelas: menolak, bukan hanya menunda.

WACANA PENUNDAAN memang dihembuskan pemerintah. Diberitakan, pembahasan RUU HIP akan ditunda. Pemerintah juga meminta DPR menyerap aspirasi masyarakat terlebih dulu. Sehingga RUU HIP yang dihasilkan tidak menimbulkan pro kontra.

Namun, jika mau obyektif, RUU HIP ini sudah selayaknya bukan cuma ditunda. Tapi ditolak! Mengapa?

Sudah sekitar 8 bulan saya menjadi anggota DPR RI. Dilantik pada 1 Oktober 2019 lalu. Bersumpah untuk setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.

Di samping sebagai anggota DPR RI, saya diamanahi juga menjadi anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu tugas konstitusionalnya adalah melakukan sosialisasi empat pilar MPR dan penyerapan aspirasi masyarakat. Beberapa kali sudah saya lakukan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR yang meliputi Pancasila, UUD NRI 1945,

NKRI dan Pancasila. Demikian juga dengan tugas penyerapan aspirasi masyarakat. Tugas konstitusional ini saya lakukan di daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Bertemu dengan tokoh masyarakat dan warga dari berbagai kalangan; lurah, camat, tokoh masyarakat, pengemudi ojek online, petani, pedagang, buruh dan kalangan masyarakat lainnya.

Sampai dengan saat ini, tak ada satu pun pertanyaan tentang perlunya Pancasila dibuatkan undang-undang.

Sejauh ini, tak ada satu pun aspirasi soal perlunya membuat RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Saya buka catatan kembali untuk memastikan, dan betul-betul tidak ada sama sekali.

Tak ada masyarakat yang meminta memeras Pancasila jadi Trisila, lalu Ekasila. Tak ada satu pun yang menyuarakan agar Komunisme, Marxisme dan Leninisme tidak dijadikan pertimbangan dalam membuat RUU HIP. Tak ada pula yang mengusulkan frasa: Ketuhanan Yang Berkebudayaan.

Parlemen adalah representasi rakyat. Tugasnya membuat undang-undang. Bertolak dari sini, artinya DPR harus membuat produk undang-undang yang menjadi kebutuhan rakyat. Kebutuhan dimaksud bisa kita ketahui dari aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Jika sampai detik ini, berdasarkan pengalaman saya menyerap aspirasi masyarakat, tak ada satu pun

usulan soal perlunya RUU HIP, lalu darimana ide tersebut muncul? Di sisi lain, itu juga menunjukkan bahwa RUU HIP membuat jurang yang lebar antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Betapa tidak, rakyat sama sekali tak mengajukan aspirasi soal RUU HIP, tapi mengapa wakil rakyatnya ngotot?

Sejak awal, posisi Fraksi PKS sudah tegas dan jelas. Menolak RUU HIP. Banyak hal yang menjadi alasan. Salah satunya tidak dimasukkannya TAP MPRS No XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan Komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai konsideran.

Pemerintah memang sudah menyampaikan akan menunda RUU HIP ini . Tapi seharusnya tidak cukup hanya ditunda, bahkan wajib ditolak. Pemerintah dan DPR sebaiknya fokus pada upaya membantu rakyat dalam menghadapi pandemi Corona. Bukan membuat RUU yang tak dibutuhkan rakyat.

Pancasila tak perlu ditafsirkan lagi. Juga tak perlu diperas jadi Trisila dan Ekasila. Posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah final. Yang perlu kita lakukan terhadap Pancasila adalah mengamalkannya.

Semoga pesan Bung Hatta berikut ini, bisa menjadi bahan renungan kita:

“Jika ingin Pancasila hidup sebagai perilaku masyarakat, maka pejabat pemerintah yang harus pertamanya mencontohkan pengamalannya dalam tingkah laku, juga keputusan yang diambil.” •



Sikap Kami Jelas: Tolak RUU HIP Sejak Awal!

Sudah sekitar 8 bulan saya menjadi anggota DPR RI. Dilantik pada 1 Oktober 2019 lalu. Bersumpah untuk setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.

ADA TIGA AMANAH yang saya emban di Senayan. *Pertama*, sebagai Anggota Badan Pengkajian (BP) MPR. *Kedua*, sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). *Ketiga*, sebagai anggota Komisi V.

Saya ingin berkisah posisi saya di BP MPR. Sejak Oktober tahun lalu, berbagai kajian kerap saya dan rekan-rekan anggota BP MPR lakukan, terkait 4 Pilar

MPR: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya juga sudah menjalankan tugas konstitusi, yakni menyerap aspirasi masyarakat dan sosialisasi 4 Pilar MPR tersebut.

Sudah lebih dari 10 titik kunjungan saya lakukan. Tersebar di Dapil VII Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Peserta kegiatan aspirasi dan sosialisasi tersebut beragam. Dari berbagai kalangan masyarakat. Tokoh hingga warga biasa. Camat, lurah hingga pengemudi Ojek Online.

Setiap acara ada sesi tanya jawab. Saya tuliskan semua pertanyaan dan aspirasi mereka. Sejauh ini, tak ada satu pun aspirasi soal perlunya membuat RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Saya buka catatan kembali untuk memastikan, dan betul-betul tidak ada sama sekali.

Tak ada masyarakat yang meminta memeras Pancasila jadi Trisila, lalu Ekasila. Tak ada satu pun yang menyuarakan agar Komunisme, Marxisme dan Leninisme tidak dijadikan pertimbangan dalam membuat RUU HIP. Tak ada pula yang mengusulkan frasa: Ketuhanan Yang Berkebudayaan.

Parlemen adalah representasi rakyat. Tugasnya membuat undang-undang. Bertolak dari sini, artinya DPR harus membuat produk undang-undang yang menjadi kebutuhan rakyat. Kebutuhan dimaksud bisa kita ketahui dari aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Jika sampai detik ini, berdasarkan pengalaman saya menyerap aspirasi masyarakat, tak ada satu pun usulan soal perlunya RUU HIP, lalu darimana ide tersebut muncul? Di sisi lain, itu juga menunjukkan bahwa RUU HIP membuat jurang yang lebar antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Betapa tidak, rakyat sama sekali tak mengajukan aspirasi soal RUU HIP, tapi mengapa wakil rakyatnya ngotot?

Sejak awal, posisi Fraksi PKS sudah tegas. Menolak RUU HIP. Banyak hal yang menjadi alasan. Salah satunya tidak dimasukkannya TAP MPRS No XXV tentang Pelarangan Komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai konsideran.

Karena itu, RUU HIP ini tidak hanya harus ditunda. Tapi wajib ditolak. Pemerintah dan DPR sebaiknya fokus pada upaya membantu rakyat dalam menghadapi pandemi Corona. Bukan membuat RUU yang tak dibutuhkan rakyat. •



Pemerintah dan DPR sebaiknya fokus pada upaya membantu rakyat dalam menghadapi pandemi Corona. Bukan membuat RUU yang tak dibutuhkan rakyat.

RUU HIP Tak Ditarik dari Prolegnas 2020: Kami Protes!

Kemarin, Kamis (2/7), ada rapat penting di Senayan, Jakarta. Antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Kemenkumham dan Panitia Perancang Undang-Undang. Tapi sungguh disayangkan, hasilnya tak mencerminkan aspirasi umat, ulama dan rakyat kebanyakan.



DALAM RAPAT TERSEBUT, Para Pihak sepakat untuk mencabut 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Dari ke-16 RUU tersebut, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang selama ini menjadi kontroversi tidak ditarik.

Perwakilan kami di Baleg, Pak Mulyanto memprotes dan meminta untuk RUU HIP juga turut ditarik dari Prolegnas 2020.

“Dalam kesempatan ini kita duduk tripartit untuk mengevaluasi Prolegnas 2020. Tadi saya sampaikan untuk didrop RUU HIP. Bapak pimpinan baleg, mohon catatan kami ini jadikan catatan kesimpulan sehingga nanti kita proses ke tingkat lebih lanjut bahwa PKS minta RUU HIP ini didrop dalam Prolegnas Prioritas 2020,” katanya.

Tapi Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Atgas justru mengatakan, bahwa pihaknya tidak berwenang untuk menarik RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2020.

Sebab menurutnya, dalam tata tertib DPR telah diatur, pihak yang mendesak mencabut RUU HIP harus membuat surat terlebih dahulu ke pimpinan Badan Musyawarah (Bamus).

“Lain halnya kalau kemudian ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR, itu lain lagi. Tapi ini minta ditarik, kita di Baleg tidak ada kewenangan. Masalahnya itu,” katanya.

Sikap PKS sendiri sejak awal sudah sangat jelas. Menolak RUU HIP ini dengan alasan yang bersifat filosofis, ideologis, sejarah dan konsepsional serta urgensi. Sikap tegas yang kemudian memunculkan

fitnah dari mana-mana. Di antaranya pemalsuan tanda tangan dalam dokumen rapat.

Lolosnya RUU HIP dalam Prolegnas 2020 ini seakan membuat jarak antara Wakil Rakyat dengan rakyat yang diwakilinya jadi menjauh. Umat, ulama dan komponen bangsa lain menyatakan penolakannya. Bahkan dua hari silam, saya juga masih menerima aspirasi dari Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Bekasi yang menolak secara tegas. Namun, semua itu seperti tak didengar oleh mayoritas fraksi di DPR.

Saya berharap, semua pihak bisa berpikir jernih. Tidak semata-mata untuk kepentingan kelompok, golongan atau partainya saja. Jika memang RUU HIP ini berpotensi melahirkan masalah dan turbulensi sosial politik, sebaiknya tak perlu dimasukkan dalam Prolegnas 2020.

Wabah Corona belum usai. Bahkan jumlah kasus positif masih bertambah. Fokus kita saat ini justru bagaimana mencari solusi untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi serta ketahanan pangan. Bukan mengutak-atik ideologi Pancasila yang sudah final.

Kemarahan Pak Jokowi kepada para menteri jelas mengindikasikan ada yang tidak tepat dalam kebijakan pemerintah selama ini.

Kita harus bersinergi. Bergandengan-tangan. Bahu-membahu. Jangan sampai Pak Presiden kembali marah... •

Menerima Aspirasi GMBI soal RUU HIP

Selain rapat, aktivitas harian Anggota DPR RI di Senayan yakni menerima aspirasi. Datang dari berbagai elemen masyarakat. Dan isu atau permasalahannya beragam.

HARI INI, RABU (8/7), saya menerima tamu dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Ada 6 orang yang menemui saya. Dipimpin Pak Tomy dan Pak Asep. Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap RUU HIP

“Pak Ustadz, GMBI menyatakan menolak RUU HIP. Mohon bantuannya untuk memfasilitasi bertemu dengan Baleg DPR,” ujar Pak Asep.

“Insya Allah. Kita sama-sama menjaga Pancasila dan NKRI,” jawab saya.

Melihat semakin banyak aspirasi yang datang dari berbagai kalangan, kita patut bersyukur. Sebab ini menandakan kepedulian terhadap negeri tercinta. Sekaligus bukti penolakan pada ideologi komunisme.

Usai menerima GMBI, ada dua agenda rapat penting lainnya. Yakni di Komisi V dan BAKN. Mohon doa agar saya amanah dan istiqomah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Aamiin. •

RUU HIP: Wakil Rakyat Tak Boleh Berjarak

Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terus berlangsung. Marak di berbagai daerah. Di Jabodetabek, Bali, Samarinda hingga NTB.

SEJUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT (Ormas) keagamaan juga sama. Mereka secara tegas menolak dan membuat pernyataan bersama. Ada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).

Mereka senada. RUU HIP bukan cuma ditunda. Tapi dihentikan. Pernyataan bersama yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Sayang, aspirasi yang berkembang dan menguat dari berbagai lapisan masyarakat dan kelompok seperti tak dipedulikan. Kamis (2/7), ada rapat penting di Senayan, Jakarta. Antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Kemenkumham dan Panitia Perancang Undang-Undang. Tapi sungguh disayangkan, hasilnya tak mencerminkan



aspirasi umat, ulama dan rakyat kebanyakan.

Dalam rapat tersebut, Para Pihak sepakat untuk mencabut 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Dari ke-16 RUU tersebut, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang selama ini menjadi kontroversi tidak ditarik.

Perwakilan Fraksi PKS di Baleg, Pak Mulyanto memprotes dan meminta untuk RUU HIP juga turut ditarik dari Prolegnas 2020.

“Dalam kesempatan ini kita duduk tripartit untuk mengevaluasi Prolegnas 2020. Tadi saya sampaikan untuk didrop RUU HIP. Bapak pimpinan baleg, mohon catatan kami ini jadikan catatan kesimpulan sehingga nanti kita proses ke tingkat lebih lanjut bahwa PKS minta RUU HIP ini didrop dalam Prolegnas Prioritas 2020,” katanya.

Tapi Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Atgas justru mengatakan, bahwa pihaknya tidak berwenang untuk menarik RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2020.

Sebab menurutnya, dalam tata tertib DPR telah diatur, pihak yang mendesak mencabut RUU HIP harus membuat surat terlebih dahulu ke pimpinan Badan Musyawarah (Bamus).

“Lain halnya kalau kemudian ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR, itu lain lagi. Tapi ini minta ditarik, kita di Baleg tidak ada kewenangan. Masalahnya itu,” katanya.

Sikap PKS sendiri sejak awal sudah sangat jelas. Menolak RUU HIP ini dengan alasan yang bersifat filosofis, ideologis, sejarah dan konsepsional serta urgensitas. Sikap tegas yang kemudian memunculkan fitnah dari mana-mana. Di antaranya pemalsuan tanda tangan dalam dokumen rapat.

Lolosnya RUU HIP dalam Prolegnas 2020 ini seakan membuat jarak antara Wakil Rakyat dengan rakyat yang diwakilinya jadi menjauh. Umat, ulama dan komponen bangsa lain menyatakan penolakannya. Bahkan pekan silam, saya juga masih menerima aspirasi dari Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Bekasi yang menolak secara tegas. Namun, semua itu seperti tak didengar oleh mayoritas fraksi di DPR.

Saya berharap, semua pihak bisa berpikir jernih. Tidak semata-mata untuk kepentingan kelompok, golongan atau partainya saja. Jika memang RUU HIP

ini berpotensi melahirkan masalah dan turbulensi sosial politik, sebaiknya tak perlu dimasukkan dalam Prolegnas 2020.

Wabah Corona belum usai. Bahkan jumlah kasus positif masih bertambah. Fokus kita saat ini justru bagaimana mencari solusi untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi serta ketahanan pangan. Bukan mengutak-atik ideologi Pancasila yang sudah final.

Dan jangan pula memberikan stigmatisasi kepada mereka yang menolak RUU HIP. Disebut Kadrin, ISIS, dan sejenisnya.

Wabah ini seharusnya membuat kita bersatu. Bergandengan tangan. Tak perlu menghadirkan isu atau RUU yang berpotensi membelah masyarakat. Merenggangkan kohesi bangsa.

Jangan sampai kita jadi bangsa dan negara yang gagal karena tidak tepatnya kebijakan pemerintah. Dan adanya jarak antara Wakil Rakyat dengan rakyatnya sendiri. •

Sikap Tegas PKS di Paripurna DPR: Cabut RUU HIP dari Prolegnas 2020

Kamis, (16/7), DPR RI menghelat Sidang Paripurna penutupan Masa Sidang IV Tahun 2019-2020. Jika kita mengikuti acara tersebut, atau membaca beritanya, terlihat jelas ketegasan sikap Fraksi PKS terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

F-PKS MEMINTA AGAR RUU HIP dicabut dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Sikap tegas ini disampaikan oleh rekan saya, KH. Buchori Yusuf. Beliau menginterupsi dan mengingatkan soal perubahan nama RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Haluan Ideologi Pancasila. Buchori juga menyinggung soal tuntutan massa aksi agar RUU HIP dicabut dan dibatalkan pembahasannya.

“Menyikapi dan melihat perkembangan masyarakat yang ada di DPR saat ini sejak tadi pagi, dan tadi pagi juga pukul 13.00 sampai pukul 14.00 saya bersama Ketua Baleg juga menerima utusan mereka kurang-



lebih sekitar 20 orang. Mereka menuntut hanya satu hal, agar rancangan HIP itu ditolak dan kemudian dicabut dari Prolegnas sampai kemudian mendapatkan keputusan kita pada rapat paripurna hari ini,” kata beliau. saat interupsi di rapat paripurna DPR.

“Sesuai dengan prosedur yang kita punya, Pak Ketua, dalam Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pencabutan RUU, dalam Pasal 8 jelas bahwa RUU dapat ditarik kembali DPR melalui sidang paripurna. Oleh karena itu, saya mewakili Fraksi PKS mengusulkan agar rapat paripurna hari ini bisa menyetop dan bisa menyepakati tentang penolakan atau tentang tidak membahasnya rancangan HIP untuk selanjutnya kemudian dicabut dari Prolegnas,” lanjutnya.

Sikap tegas PKS ini bukan terjadi kali ini saja. Jauh sebelum RUU HIP ini menimbulkan kegaduhan, PKS

sejak awal sudah menyatakan penolakannya. Bahkan kami tak menandatangani dokumen rapat saat membahas RUU HIP ini.

Sayang, sikap PKS ini tidak diakomodir oleh pimpinan DPR. Katanya, pimpinan sudah berkomunikasi dengan massa aksi dan meyakinkan bahwa tidak ada pengesahan RUU HIP dan omnibus law RUU Cipta Kerja saat paripurna.

Selain itu, ada mekanisme yang harus dilakukan untuk mencabut suatu RUU dari Prolegnas. Pencabutan itu disebutnya tidak bisa serta-merta dilakukan.

Kemudian disampaikan pula bahwa pemerintah sudah mengajukan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berbeda dengan RUU HIP. Sebelum rapat paripurna, pemerintah yang diwakili Menko Polhukam Mahfud MD hingga Menkum HAM Yasonna Laoly menyerahkan konsep RUU BPIP yang disebut-sebut berbeda dengan RUU HIP. Mereka juga membawa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Terkait dinamika tersebut, F-PKS mempertanyakan tiga hal, seperti disampaikan Ketua Fraksi Dr Jazuli Juwaini kepada wartawan. *Pertama*, status RUU. *Kedua*, Prosedur perundang-undangan. *Ketiga*, urgensi.

Pertama, soal kejelasan status RUU BPIP. Apakah DIM Pemerintah atas RUU HIP atau inisiatif RUU baru dari pemerintah. Keduanya berimplikasi pada prosedur yang diatur dalam undang-undang. Dan, ini akan menjawab pertanyaan kedua.

Kalau DIM pemerintah atas RUU HIP, artinya sikap pemerintah melanjutkan RUU HIP. Kalau RUU inisiatif (baru) harus dibahas sesuai prosedur dari awal: diajukan, dibahas Baleg, untuk dimasukkan prolegnas, dan disetujui Paripurna.

Sikap Fraksi PKS tegas sejak awal meminta RUU HIP dicabut sesuai aspirasi ormas, tokoh, dan rakyat Indonesia. Dan, tidak perlu ada gantinya.

Ketiga, apa urgensi RUU BPIP? Sehingga pemerintah sepertinya serius mengajukan apalagi di tengah kondisi pandemi sekarang. Bukankah BPIP sudah ada, dibentuk dengan Perpres, dan sudah seharusnya menunjukkan kinerjanya. Tinggal dibuktikan dulu peran dan kiprahnya dalam memperkuat Pancasila karena publik justru melihat lembaga ini lebih banyak kontroversinya daripada kinerjanya.

Tentu pimpinan DPR harus menjelaskan kepada Fraksi-Fraksi terkait status, prosedur, dan urgensinya. Semua itu ada alas formilnya berupa surat resmi. Dan semua akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah tentu tidak bisa diputuskan secara lisan melalui pernyataan publik.

Dalam pandangan saya, pada akhirnya, ini jadi semacam bola liar. Saling melempar ke sana kemari. Padahal, aksi penolakan dari masyarakat kian meluas dan membesar. Kamis kemarin itu, berbagai kelompok masyarakat mengepung Gedung DPR. Dari ulama hingga mahasiswa.



Dalam pandangan saya, pada akhirnya, ini jadi semacam bola liar. Saling melempar ke sana kemari. Padahal, aksi penolakan dari masyarakat kian meluas dan membesar.

Seharusnya Anggota DPR sebagai wakil rakyat bisa menangkap aspirasi tersebut. Sebab mereka sudah mengamanahi suaranya. Jangan sampai terkesan ada jarak antara wakil rakyat dengan yang diwakilinya. Kalau ini terjadi, akan sangat berbahaya.

Sebelum terlambat, sudah sepatutnya RUU HIP ini dicabut dari Prolegnas. Lebih baik memprioritaskan RUU lain yang lebih bermanfaat di masa pandemi ini. Apalagi jurang resesi ekonomi sudah di depan mata. •

RUU HIP Diganti RUU BPIP: Jangan Bermain Api!

Jelang Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (16/7), Presiden Jokowi mengutus empat menteri. Mereka adalah Mahfud MD, Prabowo Subianto, Yasonna Laoly dan Tito Karnavian. Membawa Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).

NANTINYA, RUU BPIP INI akan menggantikan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Selama ini, BPIP diatur oleh Peraturan Presiden yang keberadaannya selevel kementerian. di bawah payung peraturan presiden.

RUU BPIP terdiri atas 7 bab dan 17 pasal. Berbeda dengan RUU HIP, dalam RUU BPIP sudah termuat TAP MPRS berisi pelarangan komunisme, marxisme dan leninisme sebagai konsideran. Pasal kontroversial di antaranya berkaitan penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila juga hilang. RUU tersebut fokus pada kelembagaan BPIP.

RUU BPIP ini diharapkan akan memperkuat eksistensi BPIP. Karenanya, RUU ini diminta untuk dibahas oleh DPR dalam Prolegnas Jangka Menengah 2019-

2024. Menggantikan RUU HIP yang memunculkan gelombang penolakan.

Mencermati ini, setidaknya muncul empat pertanyaan mendasar. *Pertama*, tentang status RUU BPIP. Ini RUU baru untuk menggantikan RUU HIP atau hanya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU HIP?

Keduanya berimplikasi pada prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Kedua, soal prosedur pembuatan Undang-Undang. Kalau DIM pemerintah atas RUU HIP, artinya sikap pemerintah melanjutkan RUU HIP. Kalau RUU inisiatif (baru) harus dibahas sesuai prosedur dari awal: diajukan, dibahas Baleg, untuk dimasukkan prolegnas, dan disetujui Sidang Paripurna.

Ketiga, apa urgensi RUU BPIP sehingga pemerintah terlihat serius mengajukan di tengah kondisi pandemi Corona.

Bukankah BPIP sudah memiliki payung hukum berupa Perpres? Di sisi lain, BPIP sendiri keberadaannya menimbulkan kontroversi. Bahkan ada yang menyarankan untuk dibubarkan saja.

Keempat, tentang kepekaan. Kamis pekan lalu, di luar Gedung DPR berkumpul lautan massa. Ada ulama, umat, ormas hingga mahasiswa. Mereka menuntut agar RUU HIP dicabut dari Prolegnas. Tidak ada sama sekali meminta untuk diganti dengan RUU BPIP.

Dimana kepekaan Wakil Rakyat terhadap rakyat yang diwakilinya? Terkesan ada jarak. Antara Anggota DPR

dan rakyat terlihat berada dalam alam yang berbeda. Sama sekali tak mendengar apalagi memperjuangkan aspirasi rakyat.

F-PKS sendiri dalam Sidang Paripurna tersebut telah meminta agar RUU HIP dicabut dari Prolegnas. Sikap tegas ini disampaikan oleh rekan saya, KH. Buchori Yusuf. Beliau menginterupsi dan mengingatkan soal perubahan nama RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Buchori juga menyinggung soal tuntutan massa aksi agar RUU HIP dicabut dan dibatalkan pembahasannya.

Sikap tegas PKS ini bukan terjadi kali ini saja. Jauh sebelum RUU HIP ini menimbulkan kegaduhan, PKS sejak awal sudah menyatakan penolakannya. Bahkan kami tak menandatangani dokumen rapat saat membahas RUU HIP ini.

Jangan ada kesan mengecoh rakyat. Jangan pula bermain api. Berbahaya. Karena dampaknya akan sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. •

Pemimpin di Masa Krisis

Namanya Mas Nur Atif. Asli Lamongan, Jawa Timur. Saya menyambangi dia, Jum'at (16/5), di rumahnya di Desa Rawasari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta.

SUDAH TIGA PERIODE Mas Nur Atif menjadi lurah di desa tersebut. Kali pertama pada 2007. Ikut kontestasi karena desakan masyarakat setempat dan prihatin dengan kondisi desanya. Dia terpilih. Tanpa modal, kata Mas Nur Atif.

Periode kedua terpilih kembali. Begitu pula saat kali ketiga. Jumlah masyarakat yang memilihnya sangat banyak. Kisaran 88%. Warga desa sepertinya sangat mencintai Mas Nur Atif.

Wajar. Sebab di masa kepemimpinannya, dia sukses mengubah wajah Desa Rawasari. Dulu banyak anak setelah lulus memilih jadi pengrajin genteng, kerajinan khas daerah tersebut. Kantor desa sangat tidak layak. Jalan desa sempit dan rusak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) boleh dikatakan minim.

Mas Nur mampu mengubah semuanya. Tangan dingin kepemimpinannya membuat kondisi desa saat ini berubah total. Desanya menjadi lumbung padi di Plered. Jalan desa lebar dan mulus. Saya merasakan

langsung saat datang ke sana.

Begitulah pemimpin jika berhasil memberikan bukti. Bukan cuma janji. Tanpa dipaksa pun, masyarakat akan memilihnya untuk jadi pemimpin. Tanpa pencitraan pun, warga akan mendapuknya jadi sosok terdepan.

Mas Nur Atif bisa dikatakan memimpin di saat krisis, saat kali pertama terpilih jadi kepala desa. Situasi yang sama persis dengan apa yang kita alami saat ini. Bangsa dan negara ini sedang krisis. Akibat dari pandemi Corona. Ada krisis kesehatan, ekonomi dan berpotensi terjadi krisis sosial.

Dalam bahasa Cina maupun Jepang krisis ditulis dalam dua huruf kanji. Huruf pertama bermakna bahaya, dan huruf kedua bermakna kesempatan. Dalam krisis tentu saja ada bahaya yang mengintai. Tapi, yang tak kalah penting, selalu ada peluang-peluang baru yang bisa dimanfaatkan.

Tugas pemimpin di saat krisis adalah menjaga dan mengamankan organisasi yang dipimpinnya agar tidak terkena bahaya, sekaligus memanfaatkan berbagai peluang untuk keluar, lalu membalik situasi krisis menjadi kesempatan yang menguntungkan. Tentu saja keuntungan untuk yang dipimpinnya. Bukan keuntungan untuk diri dan kelompoknya saja.

Dalam dialog saya dengan Mas Nur Atif, tergambar jelas bagaimana cara dia memimpin desanya. Penuh empati, peduli, tegas, responsif, dan berpikir untuk jangka panjang.



Tergambar jelas bagaimana cara dia memimpin desanya. Penuh empati, peduli, tegas, responsif, dan berpikir untuk jangka panjang.

Karakter kepemimpinan seperti itu yang kita butuhkan saat ini. Kita perlu kehadiran pemimpin yang mengayomi rakyatnya di tengah krisis dahsyat hari ini. Pemimpin yang empati, dekat sedekat-dekatnya dengan rakyat. Tahu apa yang dibutuhkan rakyatnya. Bukan pemimpin yang justru menambah beban berat.

Kita juga butuh pemimpin yang bertanggung jawab. Berada di depan melindungi rakyatnya. Siap berkorban dan berjuang tanpa pamrih.

Kita juga butuh pemimpin yang tegas. Tidak menclame. Hari ini mengatakan A, besok mengatakan B. Pemimpin yang kokoh, konsisten dengan keputusannya sepanjang untuk kepentingan rakyat.

Itulah yang diajarkan Mas Nur Atif. Dan itu juga yang hari ini dan ke depan kita butuhkan.

Belajarlah dari Mas Nur Atif. Agar cinta rakyat kepada pemimpin bukan dipaksa. Dan negeri ini bisa keluar dari krisis. Aamiin. •

Menanti Jawaban Pemerintah

Dua pucuk surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) kepada dua pembantu presiden. Yakni Menteri Kesehatan dan Menteri ESDM. Terkirim pada Senin, (18/5), kemarin.

SURAT PERTAMA kepada Menteri Kesehatan. Meminta pemerintah segera membatalkan kenaikan iuran BPJS. Rencananya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 akan mengalami kenaikan perbulan Juli 2020 untuk Kelas I dan II serta pada tahun 2021 untuk Kelas III.

F-PKS memandang bahwa pelayanan kesehatan masyarakat merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. F-PKS menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS keluar disaat yang tidak tepat mengingat seluruh masyarakat Indonesia sedang berjuang melawan pandemi Covid-19, kenaikan iuran BPJS jelas menambah berat beban masyarakat.

Surat kedua kepada Menteri ESDM, mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM. F-PKS melihat alasan rasional penurunan harga BBM oleh Pertamina.

Kebijakan penurunan harga BBM sangat dinantikan masyarakat dan pelaku usaha untuk meringankan beban ekonomi di tengah wabah Covid-19. Selain itu, untuk memenuhi rasa keadilan konsumen mengingat harga minyak dunia sejak bulan Februari sudah mulai menurun.

Dalam hitungan F-PKS, saat ini harga minyak dunia sudah mencapai kisaran 30 dolar Amerika per barel, sementara asumsi dalam APBN 2020 adalah 63 dolar Amerika per barel. Karena sudah lebih dari separuh turunnya, maka sangat wajar bagi Pemerintah menurunkan harga BBM.

Sebagai perbandingan, delapan negara ASEAN seperti Malaysia, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Filipina, Thailand, Laos dan Singapura juga sudah menurunkan harga BBM dalam dua bulan terakhir ini. Malaysia dan Singapura tercatat sudah menurunkan harga BBM sebanyak enam kali. Myanmar bahkan sudah menurunkan sampai sembilan kali dalam dua bulan terakhir.

Surat ini perlu disampaikan. Sebab F-PKS melaksanakan tugas DPR dan kewajiban Anggota DPR yang diperintahkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Saat ini, aspirasi yang berkembang di masyarakat memang demikian. Mereka menolak kenaikan iuran BPJS dan mendesak penurunan harga BBM. Kedua

aspirasi ini harus F-PKS perjuangkan seoptimal mungkin PKS memandang kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk karena dampak wabah Covid-19, sangat tidak elok menaikkan iuran BPJS dalam kondisi seperti ini. Demikian juga halnya dengan harga BBM yang tidak kunjung turun, akan sangat memberatkan masyarakat.

Kalau selama ini sering disosialisasikan kepada masyarakat bahwa harga BBM mengikuti harga pasar. Saat naik masyarakat ikut saja dengan kebijakan pemerintah walaupun pada masa pergantian terbayang antrian panjang untuk mengisi BBM. Atau terkadang masyarakat harus bersitegang dengan penjaga SPBU. Dalam kondisi harga BBM dunia turun seperti sekarang ini seharusnya pemerintah *fair* untuk menurunkan harga BBM.

Pandemi Corona ini, seharusnya membuat pemerintah berhati-hati saat membuat kebijakan yang berpotensi memberatkan rakyat. Bagaimana mungkin iuran BPJS dinaikkan dan harga BBM tidak diturunkan, sementara jutaan rakyat kehilangan pekerjaan dan lahir orang-orang miskin baru.

Justru pada situasi seperti ini, pemerintah wajib hadir. Meringankan beban rakyatnya. Dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Apakah kedua surat ini akan dapat balasan?

Mari kita menanti jawaban pemerintah. •

New Normal yang Mengkhawatirkan

Usai Idul Fitri, kita seperti dibuat bingung. Tiba-tiba 'kampanye' New Normal membahana. Bahkan sampai Presiden Joko Widodo datang ke Bekasi, tepatnya ke Summarecon Mall. Katanya untuk memastikan kesiapan Kota Bekasi menerapkan New Normal.



DI SISI LAIN, kasus penambahan positif Corona terus saja terjadi. Terhitung Kamis (28/5) kemarin, total kasus positif corona (Covid-19) di Indonesia kembali melonjak. Ada penambahan kasus baru sebanyak 687 pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 24

jam terakhir. Angka kasus baru itu sedikit lebih banyak dibandingkan data pada Rabu.

Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan total jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini mencapai 24.538 pasien. Sedangkan total jumlah pasien positif corona yang meninggal di Indonesia kini sebanyak 1.496 jiwa. Tercatat ada tambahan 23 kasus kematian baru dalam sehari belakangan.

Indonesia saat ini masih memiliki 16.802 pasien positif corona yang berstatus sedang menjalani perawatan dan isolasi. Jumlah itu setara dengan 68,5 persen dari total kasus positif Covid-19 yang sudah ditemukan di seluruh Tanah Air.

Membingungkan bukan? Di satu sisi kasus positif terus bertambah, tapi di sisi lain, pemerintah terkesan 'memaksakan' New Normal.

Kita perlu memperhatikan pesan dari World Health Organization (WHO). Setiap negara yang akan melakukan transisi, pelonggaran pembatasan, dan skenario New Normal harus memperhatikan:

1. Bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 dapat dikendalikan.
2. Kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina.
3. Risiko virus corona diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi, terutama di panti jompo, fasilitas

kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ramai.

4. Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja ditetapkan - dengan jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan kebersihan pernapasan.
5. Risiko kasus impor dapat dikelola.
6. Masyarakat memiliki suara dan dilibatkan dalam kehidupan New Normal.

Kata WHO, jika negara tidak dapat memastikan kriteria tersebut sebelum mengurangi batasan, maka sebaiknya pikirkan kembali. COVID-19 tidak kenal ampun dan memiliki kemampuan untuk membanjiri sistem kesehatan terkuat di Eropa dengan cepat.

Syarat-syarat dari WHO banyak yang belum terpenuhi di negeri kita. Contoh, masih ada kesenjangan sarana prasarana kesehatan di setiap daerah dan juga SDM tenaga kesehatan.

Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit di tahun 2018 hanya 1 dibanding 1.000 penduduk, di Korea Selatan rasio 11 dibanding 1.000 penduduk.

Sementara, Presiden meminta Puskesmas untuk lebih dilibatkan dalam penanganan Covid-19, namun baru 33 persen yang kondisinya memadai.

Perlu saya sampaikan juga kondisi terkini di Surabaya, Jawa Timur. Rumah sakit Universitas Airlangga, RSUD Surabaya, menjadi rumah sakit pertama di Jawa timur, yang secara resmi menghentikan penerimaan

pasien rujukan Covid-19. Bukan hanya rumah sakit, laboratorium Institute Of Tropical Disease, atau ITD Unair, yang menjadi laboratorium Covid-19, juga melakukan hal sama.

Contoh lain tentang pelaksanaan PSBB. Di berbagai daerah tidak optimal dan banyak pelanggaran terjadi. Ini bisa dibaca bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah.

Apakah dengan kondisi masyarakat seperti ini akan siap dengan protokol kesehatan yang ketat?

Ingat, banyak pakar kesehatan yang menyatakan bahwa kurva kita belum sampai puncak. Padahal, syarat mutlak New Normal adalah ketika kurva kasus positif corona melandai atau turun signifikan.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi ada wacana anak-anak sekolah akan mulai masuk. Potensi klaster baru terbuka lebar.

New Normal harus dipikir ulang. Bahkan harus dibatalkan. Pemerintah harus fokus dulu pada penanganan kesehatan. Lakukan koordinasi pusat dan daerah secara optimal.

Jika New Normal dipaksakan, sama saja kita membiarkan rakyat berjuang sendiri. Sungguh mengkhawatirkan... •

TAPERA: Beban Baru Rakyat di Tengah Pandemi Corona

Bagai petir di siang bolong. Begitulah kehadiran Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Tiba-tiba saja tersiar kabar,

PRESIDEN JOKO WIDODO menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan TAPERA. Seluruh pekerja baik di pemerintahan dan swasta diwajibkan mengikuti program TAPERA.

Kita sangat terkejut, lazimnya mendengar suara gegang petir. Di tengah pandemi Corona yang belum usai dan krisis ekonomi yang melanda, kehadiran TAPERA sudah pasti jadi beban baru rakyat. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mungkin itu tamsil yang tepat soal ini.

PP yang ditandatangani Presiden Jokowi ini, secara otomatis merevisi keputusan tentang Tabungan Perumahan PNS yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-2 Soeharto, pada 15 Februari 1993. Mari kita sedikit kuliti isi PP tersebut.

PP No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan TAPERA ini merupakan amanah pasal 81 UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.



UU tersebut dilahirkan untuk membantu pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan papannya. Selama hampir empat tahun, amanah UU tersebut diabaikan (seharusnya paling lambat Maret 2018 PP sudah terbit). Namun, tiba-tiba muncul pada tahun 2020 pada saat terjadi pandemi corona.

Peserta BP TAPERA adalah calon PNS, aparatur sipil negara (ASN), prajurit dan siswa Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pekerja di Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta, dan pekerja apa pun yang menerima upah. Jumlah simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Demikian “ bunyi pasal 15 ayat 1 PP 25 Tahun 2020.

Skema TAPERA mengambil iuran dari pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja menanggung 0,5 persen sementara pekerja 2,5 persen dari total gaji pegawai. Iuran itu maksimal dibayar tanggal 10 setiap bulan. Kepesertaan Tapera berakhir jika pekerja memasuki masa pensiun; mencapai usia 58 tahun (syarat khusus bagi peserta mandiri); peserta meninggal dunia; atau peserta tidak memenuhi kriteria sebagai peserta 5 tahun berturut-turut.

Peserta yang sudah berakhir masa kepesertaannya dapat memperoleh pengembalian simpanannya serta hasil pemupukannya yang bisa berupa deposito perbankan, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga di bidang perumahan, atau bentuk investasi lain yang aman. Simpanan dan hasil pemupukannya wajib diberikan paling lama tiga bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir.

Beban Baru Rakyat

Di tengah wabah Covid-19, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sebesar

0%. Perkiraan ini didasarkan atas dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berlangsung selama dua bulan dan masih berlanjut. Beberapa komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi, seperti konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar pertumbuhan ekonomi misalnya, diperkirakan melambat seiring adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini, lalu konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, hadirnya PPTAPERA jadi aneh. Niat dan tujuannya baik. Tapi waktunya sangat tidak tepat.

Ingat, iuran BPJS baru saja naik. Belakangan publik di media sosial juga mempertanyakan kenaikan tarif listrik. Lalu kini rakyat diwajibkan menyisihkan gajinya dengan besaran 2,5 persen. Tak terbayangkan betapa nestapanya hidup rakyat.

Dana Talangan?

Hadirnya PP Penyelenggaraan TAPERA ini juga memunculkan kecurigaan publik. Ada kesan, pemerintah berusaha mencari sumber dana talangan baru, di tengah sulitnya kondisi keuangan negara.

Ini bisa terlihat di Pasal 27 PP Penyelenggaraan Tapera. Dijelaskan, dana iuran dapat diinvestasikan ke surat utang pemerintah. Ini artinya, pekerja diminta secara tidak langsung iuran untuk beli SBN. Banyak

pihak kemudian menafsirkan, ini dilakukan karena pemerintah sedang cari sumber pembiayaan baru di tengah pelebaran defisit anggaran.

Kecurigaan itu semakin kuat, karena ada kebijakan pemerintah dalam penyediaan sumber pendanaan penanggulangan dampak Corona. Melalui penerbitan surat utang negara (SUN) seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) f Perppu 1/2020 yang sudah menjadi UU. Dan juga pada Pasal 2 ayat (1) e pada perppu yang sama, yang pada intinya mengatakan bahwa sumber-sumber dana abadi dapat digunakan untuk pendanaan stimulus pemulihan ekonomi usai pandemi Corona.

Berdasarkan simulasi perhitungan Real Estate Indonesia (REI), dengan membayar premi 3 persen dari penghasilan, akan terkumpul dana hingga Rp 134 triliun. Angka ini diperoleh dengan asumsi peserta TAPERA diperkirakan mencapai 90 juta. Sedangkan hitungan pemerintah, dengan jumlah iuran sebesar 3 persen, maka dana TAPERA yang dapat dikumpulkan per tahun mencapai angka Rp 71 triliun. Sebuah angka yang sangat besar.

Catatan Kritis

PP Tapera ini perlu dikritisi. Sebab itu, ada beberapa catatan kritis, agar kehadirannya tidak menambah beban baru rakyat.

1. Peraturan ini sudah sekitar empat tahun terkesan diabaikan. Bukti pemerintah sebenarnya tidak

serius membangun rumah untuk rakyat. Kesan untuk mendapatkan dana talangan justru terlihat lebih nampak, akibat penerimaan pemerintah yang anjlok dan defisit APBN yang kian melebar.

2. PP Penyelenggaraan TAPERA ini hadir pada saat yang tidak tepat. Fokus pemerintah harusnya pada pangan. Sebab, pandemi ini berpotensi melahirkan krisis ketahanan pangan.
3. Potensi menurunkan pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi belanja masyarakat.
4. Angka 3% yang dibebankan kepada pemberi kerja dan pekerja, tergolong besar. Untuk pekerja, besaran iuran harusnya tidak flat, tapi tergantung nominal gaji.

Semua catatan ini bukan berarti tidak setuju terhadap program rumah untuk rakyat karena sesuai data per Maret 2019, *backlog* kebutuhan perumahan masih sebesar 7,6 juta unit. Kebutuhan papan merupakan sesuatu yang sangat penting. Tapi melihat semua catatan di atas, PP ini sudah sepatutnya ditunda.

Hari ini, rakyat terhimpit kehidupannya. Cari makan kian susah. Gelombang PHK dimana-mana. Pengusaha juga banyak yang kesulitan dan bangkrut. Pemerintah harus sensitif dengan penderitaan rakyatnya sendiri. •

Bersepeda, Ikhtiar Terhindar Corona

Selasa (2/6), saya menuju Gedung DPR RI dengan bersepeda. Meski sedang reses, saya berangkat ke Senayan karena ada jadwal wawancara dengan TV Parlemen. Mengangkat isu transportasi publik di masa New Normal.

SAYA MENGGOWES SEPEDA dari Pondok Gede, Bekasi sejauh sekitar 21 kilometer. Meskipun masih berlaku Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun jalanan sudah sedemikian ramai. Di antara Cawang menuju Tebet, saya bersama rekan pesepeda harus berebut jalan dan menyelinap di antara kendaraan bermotor.

Aktivitas mengayuh sepeda bukan hal asing bagi saya. Berangkat ke DPR dengan menaiki sepeda juga sudah saya lakukan sebelumnya. Saat masih menjadi Wakil Walikota Bekasi, gowes juga kerap saya lakukan. Saya juga banyak teman di komunitas sepeda. Salah satunya Robek (Rombongan Bekasi). Komunitas sepeda lainnya seperti Bukalam, bahkan punya jargon “Satu Sepeda Sejuta Sahabat” dan “Dulur Beda Lembur” (dalam bahasa Sunda yang berarti Saudara Berbeda Kampung).

Di tengah pandemi Corona ini, menurut pendapat



saya, bersepeda jadi salah satu alternatif olahraga yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sebuah ikhtiar untuk terhindar dari Covid-19.

Banyak manfaat bersepeda bagi kesehatan. Di antaranya:

1. Meningkatkan *mood* dan mengurangi stres.
Ada penelitian di Kanada soal ini. Bersepeda ke tempat kerja adalah cara yang efektif untuk mendapatkan *mood* terbaik. Karyawan yang bersepeda ternyata memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibanding mereka yang naik mobil.
2. Menangkal Diabetes.
Penelitian di University of Southern Denmark meng-

hasilkan kesimpulan, bahwa risiko terkena diabetes lebih rendah pada orang-orang yang rajin bersepeda.

3. Menurunkan Risiko Penyakit Jantung.

Penelitian di Inggris menyimpulkan, olahraga ringan seperti jalan kaki, jogging dan bersepeda bisa memangkas risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Mereka yang rutin bersepeda menuju tempat kerja memiliki risiko 11 persen lebih rendah. Bahkan yang hanya sesekali bersepeda, resiko kematian dini berkurang hingga 8 persen.

Walaupun, sebagai seorang yang bertuhan kita meyakini bahwa masalah ajal ada di tangan Allah SWT. Tetapi ikhtiar untuk sehat tentu harus tetap ditempuh.

Hari ini, bertepatan dengan World Bicycle Day atau Hari Sepeda Dunia. Ketetapan ini diputuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pertemuan rutin Majelis Umum PBB pada 12 April 2018.

“Sepeda adalah sarana transportasi berkelanjutan yang simpel, terjangkau, bisa diandalkan, bersih, dan ramah lingkungan,” tulis PBB, dikutip dari situs resminya un.org.

Sedemikian simpelnya sehingga ada jenis sepeda lipat yang bisa dilipat, bisa masuk transportasi umum dan mulai menjadi *lifestyle* (gaya hidup) pekerja-pekerja dan anak-anak muda perkotaan.

Ayo bersepeda. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit, di antaranya Corona. Aamiin. •



Canda

Sedang ramai nama Bintang Emon. Bahkan jadi *trending topic* di twitter. Di kanal media sosial lain juga demikian. Media online pun menjadikannya berita.

SAYA MENCARI TAHU. Lalu melihat cuplikan video-nya. Ternyata Bintang Emon sedang mengkritisi sebuah kasus dengan cara asyik. Santai dan sarat satire. Mengundang senyum, bahkan tawa. Dan tentu saja penuh hikmah.

Hidup ini memang tak selalu harus serius dan tegang. Sekali-kali perlu diselengi dengan canda. Dihadapi dengan rileks agar beban hidup terasa ringan.

Bahkan bisa jadi dengan canda, pesan-pesan sarat hikmah dapat dengan mudah dicerna.

Suri Tauladan kita, Nabi Muhammad SAW contohnya. Bercanda bukanlah hal tabu. Beberapa kali beliau mengajak istri dan sahabatnya bercanda.

Pada suatu hari Idul Adha, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Bilal bin Rabah, muazin andalan beliau.

“Bilal, Kamu berkorban apa?”

“Saya berkorban seekor ayam jago,” jawabnya.

“Oh, rupanya muazin berkorban muazin, ya,” ujar Nabi sambil bercanda.

Pernah pula suatu hari Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan tua renta.

“Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya memasukkanku ke dalam surga,” harap Sang Nenek.

“Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang yang sudah tua renta,” jawab Rasulullah SAW.

Perempuan itu pun berpaling sambil menangis. Lalu, Rasulullah SAW bersabda, Beri tahu dia kalau dia tidak akan masuk surga dalam keadaan sudah tua renta. Sebab, Allah SWT berfirman, *“Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung. Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya.”* (QS Al-Waqiah [56]: 35-37). (HR Tirmidzi).

Begitulah cara Nabi Muhammad SAW bercanda. Islam sendiri memberikan pedoman bagaimana cara kita bercanda.

Pertama, tidak menjadikan agama sebagai bahan canda. Allah SWT berfirman:

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah, Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan golongan dari kamu (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.” (QS At-Taubah [9]: 65-66)

Kedua, jangan jadikan canda sebagai habit atau kebiasaan. Karakter seorang muslim adalah serius dalam setiap urusan dan bersungguh-sungguh. Canda sekadar cara untuk rileks, rehat sejenak dari kepenatan.

Ketiga, jangan berlebihan. Sebab, canda yang berlebihan akan menjatuhkan kehormatan kita dalam pandangan manusia.

Kehormatan harga diri dalam Islam sama dengan kehormatan darah dan harta. Kesadaran orang untuk tidak mencuri harta atau mencelakai orang lain, belumlah cukup tanpa adanya kesadaran untuk menjaga kehormatan orang.

Kata Nabi SAW:

“Setiap Muslim dengan Muslim lain diharamkan darah, harta, dan harga dirinya.” (HR Muslim).

Keempat, bukan cacian, bully-an, hinaan dan cemoohan.

Allah SWT menegaskan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) itu lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok).” (QS Al-Hujurat [49]:11).

Kelima, tidak ada dusta dalam candaan.

Nabi Muhammad SAW berkata:

“Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa, celakalah!” (HR Abu Dawud).

Inilah indahnya Islam. Segala hal diatur. Dari urusan negara hingga tentang canda. Sehingga hidup lebih menyenangkan dan membahagiakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menerima kritikan, meski dibungkus dengan canda.

Aamiin. •

Belajar dari Liverpool

Hari ini Liverpool jadi *trending topic*. Di twitter ada di posisi pertama. Di kanal media sosial lainnya juga ramai. Maklum, tadi malam The Reds, julukan Liverpool baru saja juara, usai Chelsea taklukkan Manchester City. Butuh waktu 30 tahun bagi Liverpool untuk merasakan juara lagi.

LAMA YA? TENTU SAJA. Itu sama dengan tiga dekade atau dasawarsa. Rentang waktu yang teramat panjang dalam sepakbola. Kalau dalam politik, itu sama dengan 6 kali pemilu.

Nah, pasti ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari penantian panjang fans Liverpool. Apa rahasia dari Mohamed Salah dkk serta Sang Pelatih Jurgen Klopp?

Kalau saya amati, setidaknya tiga hal ini jadi kunci suksesnya.

Pertama, memilih pemimpin yang tepat. Di tangan Jurgen Klopp sejak 2015, Liverpool berkembang pesat. Tiap tahun prestasinya meningkat. Tahun lalu mereka juara Liga Champions. Kini kampiun Liga Inggris.

Klopp dianggap sosok yang tepat untuk The Reds. Jago taktik, dekat dengan pemain, rendah hati, pintar memotivasi dan seterusnya. Di tangan Klopp, pemain-pemain yang biasa saja bisa jadi bintang.

Saya jadi teringat ungkapan ‘di tangan seorang pemimpin yang tepat, segerombolan kucing bisa jadi singa. Sebaliknya, jika tak tepat, seorang pemimpin hanya akan membuat sekelompok singa jadi kucing’.

Kedua, identitas atau ‘ideologi’ yang jelas. Banyak yang mengatakan, di era Klopp, Liverpool sukses mendapatkan identitasnya. Atau dalam bahasa politik ya ideologi.

Strategi dan taktik *gegenpressing* yang Klopp bawa dari Jerman, ternyata pas dengan ideologi Liverpool. Menekan lawan dan merebut bola setiap saat.

Nah, jangan main-main dengan identitas atau ideologi. Jika salah saja memilih, maka kita akan gagal. Kalau sudah punya ideologi yang jelas dan terbukti sakti, tidak perlu kita ubah.

Ketiga, sabar. Ini penting dimiliki. Bayangkan, 30 tahun puasa gelar. Tapi Liverpool tak menyerah. Gigih. Terus berjuang. Hingga akhirnya jadi juara lagi.

Dari Liverpool, kita bisa belajar banyak hal. Tak hanya untuk kepentingan sepakbola, tapi juga bangsa dan negara.

Selamat untuk Liverpool. •



Liverpool, Ideologi dan Hari Keluarga Nasional

Hari ini kita memperingati Hari Keluarga Nasional. Saya coba kaitkan dengan keberhasilan Liverpool menjuarai Liga Inggris, gelar yang kembali diraihinya setelah 30 tahun silam.

SALAH SATU KUNCI SUKSES klub asuhan Juergen Klopp itu adalah kejelasan identitas. Atau dalam bahasa politiknya yakni ideologi. Klopp dianggap mampu memberikan strategi dan taktik yang sesuai dengan filosofi Liverpool. Menekan, mengejar bola, penuh hasrat menggebu. Nilai-nilai itulah yang selama

ini dimiliki Liverpool tapi seakan sirna dalam tiga dekade terakhir.

Itulah pentingnya sebuah ideologi. Karena dia kunci. Di level manapun. Termasuk keluarga, apalagi bangsa dan negara.

Pentingnya ideologi itulah yang juga ada dalam ajaran Islam. Simaklah bagaimana Luqman berbicara kepada anaknya. Dia tanamkan nilai-nilai ideologi ketauhidan kepada keluarganya.

Wasiat pertama Luqman kepada anaknya adalah tentang larangan berbuat syirik. Allah Ta'ala berfirman:

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: *“Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar.”* (QS. Luqman : 13)

Laa Tusyrik Billah!: Larangan Berbuat Syirik dalam Bentuk Apapun

Makna firman Allah:

“Janganlah kamu berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah “

Maksudnya, jangan menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sekutu dalam beribadah, dalam penciptaan dan takdir, serta dalam masalah nama dan sifat Allah.

Kita ketahui, tauhid dibagi menjadi tiga. Yakni tauhid *rububiyah*, tauhid *uluhiyyah*, dan tauhid *asma' wa shifat*. Maka kesyirikan pun mencakup syirik

dalam tiga tauhid di atas. Siapa meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam *rububiyah*. Barangsiapa meyakini bahwa ada yang berhak untuk disembah selain Allah maka dia telah syirik dalam *uluhiyyah*. Dan barangsiapa yang menyalahi dan menolak nama dan sifat Allah maka dia telah syirik dalam *asma' wa shifat*. Larangan berbuat syirik mencakup larangan berbuat syirik dalam tiga bentuk tauhid ini.

Luqman menyadari pentingnya menanamkan ideologi tauhid. Sebab dalam perjalanan hidup, ketauhidan jadi pedoman sekaligus pondasi setiap anak manusia. Sekaligus kunci kesuksesan dunia akhirat.

Dengan penanaman ideologi ini, maka insya Allah keluarga dan keturunan kita akan terhindar dari api neraka.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tahrīm: 6)

Dengan ideologi tauhid yang kita tanamkan sejak dini, maka anak-anak kita akan seperti Nabi Ismail as.

“Maka Tatkala anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai Anakku, sesungguhnya Aku melihat dalam

mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu? Ia menjawab: "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, Insya Allah Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." (QS. As Shaffat : 102)

Ini dialog yang sungguh luar biasa. Bayangkan, kala itu sebagai seorang Ayah, Nabi Ibrahim as menghadapi situasi konflik yang sangat pelik. Dia harus menyembelih anaknya yang dinanti kehadirannya sejak lama.

Sebagai seorang Ayah, Nabi Ibrahim tentu saja berkuasa atas anaknya. Dia memiliki otoritas untuk membuat anaknya taat. Namun, yang dilakukannya bukan bertindak otoriter dan instruktif. Dia justru mengajak Sang Anak dialog dengan rangkaian kalimat nan indah.

Nabi Ibrahim as mengedepankan dialog. Persuasif. Tak ada kekerasan. Dan respons pendekatan tersebut dari Nabi Ismail as tak kalah dahsyatnya. Ismail mempersilakan Sang Ayah menyembelihnya jika memang perintah Allah SWT. Bahkan di akhir jawabannya, Ismail menyelipkan optimisme untuk sabar menghadapi ujian ini. Sungguh ideologi tauhid yang luar biasa.

Semoga kita bisa meneladani jejak para nabi. Menanamkan ideologi tauhid agar anak keturunan kita terhindar dari siksa api neraka.

Selamat Hari Keluarga Nasional. •

Memimpin Rapat BAKN, Mengkaji Pengelolaan Subsidi Minyak dan Gas



Dua pekan terakhir ini, agenda rapat di DPR kian padat. Mayoritas saya hadir secara fisik. Tidak virtual. Mengingat di antara agenda tersebut, saya sendiri yang harus memimpin jalannya rapat.

SEPERTI DIKETAHUI, selain sebagai anggota Komisi V DPR dan Badan Pengkajian (BP) MPR, saya juga

diamanahi menjadi Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Setidaknya sudah 4-5 kali saya rapat di BAKN dalam pekan-pekan ini. Tema yang kami bahas soal subsidi energi, minyak dan gas nasional. Rapat ini dinamakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan dalam pengelolaan subsidi. BAKN sendiri tupoksinya adalah melakukan telaah atas temuan-temuan BPK.

Di Indonesia, kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi diperuntukkan untuk melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar.

Subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp 246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan belanja di lebih 5 kementerian lembaga.

RDPU dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait subsidi energi dan melihat lebih jauh efektifitas kebijakan dan metode pemberian subsidi energi yang diterapkan oleh pemerintah. Beberapa pakar diundang sebagai Nara sumber. Juga para pelaku usahanya seperti Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan

Gas (Hiswana).

Saya menegaskan, kebijakan subsidi haruslah tepat sasaran. Manfaat subsidi energi mesti bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin di Indonesia.

Pada prakteknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia, yang justru keluar dari konteks proteksi terhadap kelompok masyarakat miskin. Manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya.

Meskipun di satu sisi subsidi dipandang sebagai bantuan sosial, namun kebanyakan subsidi energi Indonesia lebih bersifat regresif. Dengan kata lain hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat dari subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin.

Pada saat yang sama, mekanisme harga tetap juga mendorong konsumsi energi yang boros dan sia-sia, dimana hanya memberikan sedikit insentif untuk meningkatkan efisiensi energi atau mengurangi emisi gas rumah kaca domestik, dan berkontribusi pula terhadap memburuknya neraca perdagangan Indonesia.

Kita berharap, ke depan subsidi lebih tepat sasaran. Juga transparan sehingga potensi kebocoran bisa dikurangi. Dengan cara itulah, cita-cita menjadikan *Welfare State* atau Negara Kesejahteraan dapat terwujud.

Aamiin. •

Menangkap Obsesi KH. Hilmi Aminuddin

Saat mengenang KH. Hilmi Aminuddin yang baru saja wafat, saya teringat pada sebuah acara DPW PKS Jawa Barat. Kala itu, beliau diundang sebagai pembicara untuk memberikan arahan dan nasehatnya kepada para pengurus.

ADA PESAN YANG SAYA TANGKAP yang merupakan obsesi beliau. Yakni menjadikan wilayah yang kepala daerahnya dari PKS sebagai *The Shining City on The Hill*. Obsesi atau impian dimaksud, lanjut KH. Hilmi Aminuddin, ditandai setidaknya lima hal.

Pertama, infrastruktur yang baik. Infrastruktur yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah jalan. Sehingga diharapkan jalanan terjaga baik kemantapannya atau mulus. Dalam bahasa Sunda disebut *jalan-jalanna laleucir*.

Kedua, infrastruktur yang baik akan memperlancar mobilitas orang dan barang. Dengan begitu, akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang akan berdampak pada orang akan mudah mendapatkan rezeki. Dalam bahasa Sunda *rizkina gampang diangkir*.

Ketiga, terbukanya pintu-pintu rezeki akan berdampak kepada kesejahteraan. Salah satu bentuk



kesejahteraan, masyarakat merasa ketercukupan pangan sehingga masyarakatnya gemuk-gemuk. Dalam ungkapan beliau *beuteung rahayat baluncir*.

Keempat, tingkat kesejahteraan yang baik akan membawa orang untuk meningkatkan kualitas keilmuannya. Dengan tingkat pemahaman yang baik maka seseorang akan mudah diajak berpikir, berdiskusi dan dewasa dalam berdemokrasi. Tidak emosional. Istilah beliau, *rahayatna gampang* diajak mikir.

Kelima, pada akhirnya orang ingin mencapai kebahagiaan yang tertinggi yaitu semakin dekatnya dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi Rizki, Sang Pemilik Pengetahuan di atas segala ilmuwan, yaitu Allah SWT, yang dimanifestasikan dengan banyak berdzikir kepada Allah SWT. Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan ketenangan sejati. Dalam bahasa Ustadz Hilmi, tenang berdzikir.

Itulah lima hal yang saya tangkap dari obsesi beliau untuk mewujudkan *The Shining City on The Hill*. Tentu bukan hanya saya yang mendengar pesan beliau ini. Apalagi pesan ini pun sering beliau ulang dalam beberapa kesempatan.

Entah mengapa pesan tersebut sering terngiang. Bahkan, saat saya diamanahi untuk menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 – 2023, saya tuangkan pesan-pesan beliau dalam sebuah lirik lagu Sunda yang berjudul Jawa Barat Maju.

*Jawa Barat lemah cai urang Sunda
Anu Endah anu urang sarerea
Rek kusaha, nya kuurang sadayana
Dimumule dijaga dipelihara*

*Jawa Barat Maju jalan-jalanna laleucir
Jawa Barat Maju rizkina gampil diangkir
Jawa Barat Maju beuteung rahayat baluncir
Rahayatna gampil diajak mikir sareng tenang
berdzikir*

*Jawa Barat pasti bakal bade pisan
Lamun urang sauyunan babarengan
Rempug jukung keur ngarojong pangwangunan
Nanjeurkeun kaadilan kasejahteraan*

*Jawa Barat Maju jalan-jalanna laleucir
 Jawa Barat Maju rizkina gampil diangkir
 Jawa Barat Maju beuteung rahayat baluncir
 Rahayatna gampil diajak mikir sareng tenang
 berdzikir*

*Jawa Barat pamingpinna nu hebat
 Jawa Barat pasti mawa maslahat
 Jawa Barat rizki gampil diangkir
 Rahayatna gampil diajak mikir sareng tenang
 berdzikir.*

Setelah liriknya selesai, saya tuangkan dalam bentuk lagu. Kemudian pada saat saya Bersilaturahmi kepada beliau di Lembang, CD lagu tersebut saya serahkan ke beliau. Saya sekaligus minta izin pesan-pesan beliau saya tuangkan melalui lagu. Beliau hanya membalas dengan senyuman.

Insy Allah, kader-kader PKS akan terus mengingat dan merealisasikan obsesi beliau ini. Karena pada dasarnya, obsesi ini merupakan realitas kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Semoga... •

Saatnya Kembali ke Koperasi

Di Hari Koperasi ke-73 Tahun, kita patut tercengang dengan data dan fakta ini. Terkait dengan kondisi terkini koperasi di Tanah Air.

SEKITAR 2 TAHUN LALU, Kementerian Koperasi melansir data hanya tersisa 152 ribu koperasi dari yang sebelumnya 212 ribu koperasi. Ada 47 ribu koperasi yang sudah dibubarkan karena hanya nama saja. Tidak ada aktivitas bisnisnya dan tidak ada RAT selama dua tahun berturut-turut.

Sementara itu, di luar negeri koperasi justru kian berkembang. Berhasil menjadi tulang punggung negara-negara kaya di dunia. Koperasi di Prancis menguasai 60 persen bank ritel. Sebanyak 91 persen petani di Jepang adalah anggota koperasi. Koperasi di Kuwait menguasai 70 persen perdagangan ritel nasional. Koperasi farmasi di Belgia menguasai 20 persen pangsa pasar nasional. Koperasi konsumen di Denmark menguasai 37 persen pasar ritel.

Di Singapura, 55 persen supermarket dimiliki oleh komunal, melalui koperasi. Dari sisi bisnis jasa keuangan, tercatat 45,3 juta penduduk Asia adalah anggota koperasi kredit, termasuk yang terus tumbuh di Indonesia.



Saat ini, tercatat 1 dari 4 penduduk Jerman dan Amerika adalah anggota koperasi. Sementara itu, di Kanada 4 berbanding 10; di Singapura 1 banding 2; dan masih banyak negara yang tren anggota koperasi terus meningkat.

Apa yang terjadi di manca negara itu sebenarnya bukan hal aneh. Dulu, Mohammad Hatta yang kita beri gelar Bapak Koperasi Indonesia, pernah pergi ke Denmark untuk melihat bagaimana pengelolaan koperasi di sana.

Putri sulung Bung Hatta, Meutia Farida Hatta yang menyatakan ini. Kata dia, saat ayahnya belajar di Belanda, Bung Hatta melihat perekonomian di Indonesia tidak dikelola secara tidak baik. "Lalu, apa yang baik untuk rakyat? Bung Hatta pergi ke

Denmark melihat koperasi dan berpikir, ini yang cocok karena prinsip kebersamaan di desa-desa antarkaum, antarkerabat,” ujar Meutia.

Bung Hatta memang memiliki mimpi besar terhadap perekonomian rakyatnya. Ia ingin persatuan hati dan kebersamaan membawa kesejahteraan bagi perekonomian seluruh rakyat Indonesia.

Sayang, praktek koperasi di Tanah Air masih jauh dari mimpi Bung Hatta. Masih belum sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Animo rakyat kepada koperasi juga berkurang, terutama di kalangan generasi muda. Sebagian mereka lebih memilih untuk membangun usaha sendiri.

Padahal di masa pandemi Corona ini, konsep koperasi yang berbasis komunitas atau komunal bisa diandalkan dan memiliki daya tahan kuat. Maka dari itu, untuk kembali memopulerkan koperasi, pemerintah harus serius mengampanyekan gerakan kembali ke koperasi. Sebab semangat kegotongroyongan dan kebersamaan masyarakat kita menjadi modal dasar bagi eksistensi koperasi.

*Dirgahayu Koperasi ke-73 Tahun
Koperasi Maju Rakyat Sejahtera*

1. <https://radarbekasi.id/2020/07/13/saatnya-kembali-ke-koperasi/>



Fraksi PKS: TAP MPRS No. XXV/1966 Harusnya Jadi Landasan dalam RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila)

JAKARTA (3/5) – Di baleg DPR RI sedang dibahas RUU Haluan Ideologi Pancasila, yang diusulkan oleh Fraksi PDIP. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengkritisinya, dan antara lain mengusulkan hal mendasar agar ada komprehensitas dalam berideologi Pancasila, maka sewajarnya TAP MPRS No.XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme juga dimasukkan sebagai landasan dalam pembahasan RUU HIP, dengan antara lain memasukkannya ke dalam bagian dari konsideran “Meningat” dalam landasan Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Draft RUU HIP usulan FPDIP ini tidak memasukkan ketentuan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai bagian dari konsideran “Meningat”. Disampaikan Anggota Badan Legislatif dari Fraksi PKS

DPR RI Mulyanto pada hari Ahad (3/5) di Jakarta.

Mulyanto menjelaskan TAP MPRS yang oleh MPR RI dinyatakan masih berlaku ini sangat penting dan relevan untuk dapat melindungi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dari pengaruh paham atau ajaran yg merongrong ideologi Pancasila, yaitu Komunisme/Marxisme Leninisme di tengah percaturan politik regional maupun global dalam perang dagang dan politik antara *state capitalism* dan *corporate capitalism*.

FPKS juga mengkritisi bahwa draft RUU HIP ini lebih menekankan bahwa yang dimaksud dengan Pancasila adalah Pancasila 1 Juni 1945, bukan pada Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Pancasila yang disepakati oleh PPKI dengan Ketuanya Bung Karno. Pancasila yang berlaku secara legal konstitusional dan tetap diberlakukan sampai sekarang. Karena yang dirujuk oleh draft RUU itu adalah Pancasila 1 Juni 1945, maka dalam RUU tersebut secara eksplisit muncul pasal terkait dengan “Trisila” dan “Ekasila”. Dimana, 5 sila (Pancasila) diperas menjadi 3 sila (Trisila), dan kemudian diperas lagi menjadi hanya 1 sila (Ekasila), yaitu gotong-royong. Suatu hal yang tidak pernah ada dalam Pembukaan UUD 45 yang disepakati dan ditetapkan oleh para *Founding Fathers* dalam PPKI yang diketuai oleh Bung Karno.

“Karenanya FPKS mengkritisi draft RUU HIP ini, yang cenderung meletakkan agama hanya sebagai instrumen pelengkap dalam kehidupan bermasyarakat,



“Dan bahwa RUU HIP tersebut dapat ditafsirkan menihilkan sila-sila yang lain dalam Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan konsensus nasional para *founding fathers* dalam PPKI yang diketuai oleh Bung Karno,” ujar doktor lulusan Jepang ini.

berbangsa dan bernegara. Dan bahwa RUU HIP tersebut dapat ditafsirkan menihilkan sila-sila yang lain dalam Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan konsensus nasional para *founding fathers* dalam PPKI yang diketuai oleh Bung Karno," ujar doktor lulusan Jepang ini.

Legislatur asal Banten ini juga memaparkan nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, sebagaimana disepakati oleh PPKI itu, dan yang oleh MPR RI dinyatakan tetap berlaku dan tak dapat dilakukan perubahan itu, harus disampaikan secara lengkap dan utuh, sesuai dengan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945; serta tidak boleh menjadi alat indoktrinasi sebagai ideologi tertutup yang mereduksi HAM, mengecilkan nilai agama, apalagi dilaksanakan dengan pendekatan *security*, sebagaimana yang pernah dialami di Era Orde Baru.

Karenanya FPKS juga usulkan agar Baleg mencabut dan menghapuskan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 6 terkait dengan Trisila dan Ekasila. Karena, dalam sejarah ketatanegaraan kita, sebagaimana yang terjadi dalam rapat-rapat BPUPK juga dalam rapat-rapat PPKI, berbagai pandangan *founding father* tentang trisila dan ekasila telah diperkaya dan dirumuskan dalam formula yang lebih komprehensif.

"Untuk mendapat penerimaan yang luas dari masyarakat dan benar-benar memenuhi aspirasi dari seluruh komponen bangsa, dan agar sesuai dengan fakta sejarah Pancasila sebagaimana disepakati oleh PPKI, dan perpres

soal Hari Lahir Pancasila, maka RUU HIP ini harus hadir komprehensif, tidak mengecilkan sila2 yang lain, apalagi mempertentangkan antara prinsip “ketuhanan” dan prinsip “kebangsaan”, pungkas Mulyanto.

Sebagai informasi, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ini adalah RUU inisiatif DPR RI dengan pengusul Anggota Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dari FPDIP, yang termasuk dalam RUU Prioritas tahun 2020 dalam Prolegnas 2020-2024. RUU ini diharmonisasi dan dimantabkan dalam Panitia Kerja (Panja) RUU HIP yang dibentuk oleh Baleg DPR RI.

RUU HIP telah selesai dibahas di tingkat Panja, dan pada tanggal 22 April 2020 telah dibahas didalam Rapat Pleno Baleg DPR RI. Dalam rapat tersebut, berbagai kritik dan masukan FPKS diterima. Semoga usulan-usulan FPKS yang merupakan aspirasi warga juga, benar-benar dimasukkan dan menjadi ketentuan-ketentuan dalam RUU tersebut. Dan karena RUU ini terkait dengan ideologi Bangsa, sangat penting DPR berlaku transparan dengan sosialisasi lebih terbuka dan lebih luas. Sekarang RUU tersebut berada pada tahap penyiapan naskah akhir hasil Pleno Baleg tanggal 22 April 2020 untuk dibawa ke dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI (Bamus) untuk selanjutnya disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI. •

Terima Ulama Kabupaten Bekasi Tolak RUU HIP, Syaikh: Kami akan Terus Perjuangkan!

ANGGOTA DPR RI AHMAD SYAIKHU menerima kunjungan ulama yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu Kabupaten Bekasi (FUIB), di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6). Para ulama menyampaikan aspirasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Syaikh menyatakan akan terus memperjuangkan aspirasi para ulama. Sebab ini sejalan dengan PKS sejak awal yang menolak RUU HIP.

“Terimakasih kepada para ulama yang peduli dengan bangsa dan negara. Saya bersama Fraksi PKS akan terus memperjuangkan karena ini sejalan dengan sikap kami sejak awal, yakni menolak RUU HIP,” papar Syaikh.

Mantan Wakil Walikota Bekasi menyampaikan kronologis perjalanan RUU HIP. Intinya, Syaikh menegaskan PKS memiliki sikap yang terang-benderang, yaitu menolak RUU HIP. Salah satu alasan mendasarnya adalah tidak dimasukkannya TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 yang berisikan Pembubaran PKI dan Pelarangan Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Syaikhu juga menjelaskan beberapa fitnah kepada PKS terkait RUU HIP. Di antaranya pemalsuan tandatangan dalam dokumen rapat Badan Legislasi (Baleg) yang membahas RUU HIP.

“Banyak fitnah kepada kami soal RUU HIP. Salah satunya pemalsuan tandatangan,” kata Syaikhu.

PKS, lanjut Syaikhu, akan terus bersama umat dan ulama. Apalagi jika sudah menyangkut komunisme, PKS dipastikan tak akan pernah meninggalkan umat dan ulama.

“Kami akan terus kebersamai umat dan ulama jika menyangkut soal Komunisme dan NKRI,” tegas Syaikhu yang berasal dari Dapil VII Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Selain Syaikhu, hadir pula Ketua Fraksi PKS Dr. Jazuli Juwaini. Dia mengucapkan terimakasih kepada para ulama yang telah mempercayakan aspirasinya kepada PKS.

“Terimakasih kepada para ulama atas kepercayaannya. Insya Allah PKS akan berkah karena berjuang bersama umat dan ulama,” kata Jazuli.

Para ulama yang hadir antara lain KH Dahlan, KH. Imam Mulyana dari Dewan Masjid Indonesia, KH. Madrais Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amal, H. Ihsan Said, Ust Ahmad Yani, H Damin Sada dari Jawara Jaga Kampung Bekasi, Dede Sulaeman dari FPI Kabupaten Bekasi dan Ust. Tuji Cahyadi. •

Ahmad Syaikhu Desak Pemerintah Setop Relaksasi PSBB di Bandara

ANGGOTA KOMISIV DPR RI Ahmad Syaikhu meminta pemerintah segera menyetop relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di bandara. Hal ini terkait dengan ramainya antrian penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (14/5).

“Setop segera relaksasi PSBB di bandara. Karena berpotensi menambah klaster baru kasus corona,” ujar Syaikhu.

Menurut Politisi PKS itu, kejadian ini sebenarnya sudah pernah diprediksi oleh F-PKS saat rapat kerja Komisi V dengan Kementerian Perhubungan. PKS menentang diperbolehkannya kalangan swasta dan pebisnis untuk melakukan perjalanan.

F-PKS berpendapat untuk saat ini semua rapat dapat dilakukan secara *online*, dan pengiriman barang cukup menggunakan jasa kurir. Namun ternyata Pemerintah melalui Surat Edaran Gugus Tugas No.4 Tahun 2020 tetap melakukan pelanggaran sehingga lonjakan penumpang tak terhindarkan.

“Sejak awal kami dari PKS menentang rencana relaksasi ini. Sebab pasti akan ada lonjakan. Dan ternyata betul terjadi,” kata Syaikhu lagi.

Kejadian ini, lanjut mantan Wakil Walikota Bekasi



itu, membuktikan ketidaksiapan dan kurangnya koordinasi di jajaran Pemerintahan. Seharusnya lonjakan penumpang ini telah diprediksi.

“Jelas ini tidak ada koordinasi dan kesiapan. Berantakan,” tegas Syaikh.

Sebelum Surat Edaran tersebut efektif diberlakukan, menurut Syaikh, jajaran Pemerintahan harus melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait teknis pelaksanaannya. Bila perlu pemeriksaan berkas-berkas

tersebut dilakukan secara *online* dan pada saat antrian di Bandara disediakan petugas yang cukup untuk memastikan berjalannya aturan PSBB.

Bercermin dari kejadian ini, apabila Pemerintah tidak segera berkoordinasi dan tidak bisa memastikan berlakunya PSBB di Bandara, Stasiun dan Terminal, Syaikh mendesak agar Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 No.4 Tahun 2020 dicabut. Lalu terapkan aturan sesuai Permenhub No.25 Tahun 2020 yang hanya memperbolehkan perjalanan bagi operasional pemerintahan, petugas Kesehatan, dan pelayanan darurat.

“Jika tidak ada koordinasi dan jaminan pemberlakuan PSBB, pemerintah harus secepat mungkin mencabut surat edaran gugus tugas,” desak Syaikh.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 No.4 Tahun 2020 terkait Kriteria Pembatasan Perjalanan



“Jika tidak ada koordinasi dan jaminan pemberlakuan PSBB, pemerintah harus secepat mungkin mencabut surat edaran gugus tugas,” desak Syaikh.

Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19, memungkinkan pegawai swasta melakukan perjalanan melintasi wilayah PSBB. Surat Edaran ini memberikan pelanggaran dibandingkan dengan Permenhub No.25 Tahun 2020 yang hanya memperbolehkan perjalanan bagi operasional pemerintahan, petugas Kesehatan, pemulangan WNI dari luar negeri dan pelayanan darurat (orang sakit dan jenazah).

Akibatnya, calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta membludak, dan mereka harus berdesak-desakan menunggu giliran untuk mengumpulkan syarat berpergian.

Menurut Kabid Humas Ditjen Perhubungan Udara Budi Prayitno mengatakan, antrian terjadi karena petugas kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soetta tak mampu mengimbangi banyaknya penumpang. Kerumunan yang tampak pada foto juga terlihat tidak menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena tidak ada petugas yang mengatur.

Hal ini sangat ironis mengingat aturan mendasar PSBB melarang adanya kerumunan lebih dari lima orang, namun kini kerumunan terjadi karena aturan yang dibuat oleh Pemerintah sendiri. •

Link berita:

1. <http://pks.id/content/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara>
2. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28759/t/ad+Syaikhu+Desak+Pemerintah+Setop+Relaksasi+PSBB+di+Bandara>
3. <https://www.antarane.ws.com/berita/1492484/legislator-pemerintah-harus-jamin-pemberlakuan-psbb-di-bandara>
4. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/17445231/bandara-soetta-padat-dpr-minta-pemerintah-hentikan-relaksasi-psbb-di-bandara?page=1>
5. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qabwcf354>
6. <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/313005-ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara>
7. <https://www.tribunnews.com/dpr-ri/2020/05/15/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara>
8. <https://www.liputan6.com/news/read/4255386/penumpang-menumpuk-di-bandara-soetta-pks-desak-relaksasi-psbb-dihentikan>
9. <https://www.google.com/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara>
10. <https://radarbekasi.id/2020/05/14/syaikhu-setop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
11. <https://beritapublik.co.id/2020/05/14/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
12. <https://bekasiguide.com/2020/05/14/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
13. <http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-roya/nasional/7278-ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara>
14. <https://gobekasi.id/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-stop-relaksasi-psbb-di-bandara/>

15. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/05/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop.html?m=1>
16. <https://kabarbekasi.id/2020/05/14/syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
17. <https://www.radarnusantara.com/2020/05/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop.html>
18. <https://www.lintasparlemen.com/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
19. <https://jurnalpriangan.com/2020/05/anggota-dpr-ri-ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-stop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
20. <https://tvberita.co.id/news/komisi-v-dpr-ri-desak-pemerintah-stop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
21. <https://www.youtube.com/watch?v=zh1A3B2bpho>
22. <https://www.helmiadamchannel.com/2020/05/ahmad-syaikhu-stop-relaksasi-psbb-di.html?m=1>
23. <http://zonapantau.com/2020/05/14/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
24. https://www.atmago.com/posts/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara_post_id_e6fc7cdd-128b-475f-a2fd-2f224eb86301
25. <https://ruangindonesia.com/2020/05/14/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
26. <http://www.wajahbekasi.com/2020/05/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop.html>
27. <https://m.suarakarya.id/detail/111224/PKS-Desak-Pemerintah-Stop-Relaksasi-PSBB-Di-Bandara>
28. <https://pilarrepublik.com/2020/05/14/ahmad-syaikhu-stop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
29. <http://www.jurnalbandung.com/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
30. <http://www.transparannews.com/politik/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
31. <https://infobekasi.co.id/2020/05/14/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara/>

32. <http://m.rilis.id/dpr-desak-pemerintah-hentikan-relaksasi-psbb-di-bandara>
33. <https://teropongindonesia.com/2020/05/ahmad-syaikhu-desak-pemerintah-setop-relaksasi-psbb-di-bandara/>
34. <http://www.teropongsenayan.com/112712-imbasmembludaknya-massa-di-bandara-soetta-pks-sejak-awal-kami-menolak-relaksasi-psbb>
35. <https://www.google.com/amp/s/www.radarbogor.id/2020/05/14/kerumunan-penumpang-di-soetta-stop-relaksasi-psbb-di-bandara/amp/>
36. <https://www.alinea.id/politik/berantakan-pks-minta-setop-relaksasi-psbb-di-bandara-b1ZMY9ut4>
37. <https://www.metrobatam.com/2020/05/anggota-dpr-ri-desak-pemerintah-hentikan-relaksasi-di-bandara/>
38. <https://akurat.co/news/id-1116320-read-komisi-v-relaksasi-psbb-di-bandara-berpotensi-menambah-klaster-baru-kasus-corona>
39. <https://fin.co.id/2020/05/15/ramai-ramai-mudik-via-pesawat/2/>
40. http://kaltengpos.co/berita/-46265-pembatasan_dilonggarkan,_ramai-ramai_mudik_via_pesawat.html?page2
41. <https://magelangekspres.com/2020/05/15/ramai-ramai-mudik-via-pesawat/>

PKS: “New Normal, OJOL Boleh Bawa Penumpang dengan Protokol Kesehatan

ANGGOTA DPR RI, Ahmad Syaikh, meminta pemerintah membolehkan Ojek Online (OJOL) membawa penumpang di masa “New Normal”. Syaratnya, dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Hal itu disampaikan Syaikh menanggapi rencana penerapan “New Normal” oleh pemerintah pusat dan daerah. OJOL menjadi salah satu profesi yang harus diperhatikan terkait rencana tersebut.

“OJOL harus dibolehkan bawa penumpang. Tapi dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya.

Politisi PKS mendesak agar pemerintah segera membuat panduan atau aturannya. Sehingga ketika “New Normal” dilaksanakan, sudah jelas pijakannya.

“Aturan utamanya harus segera dibuat. Agar saat pelaksanaan jelas semuanya. Tidak simpang-siur,” kata Syaikh lagi.

Politisi PKS itu memberi contoh soal panduan dimaksud. Misalnya, pengguna OJOL wajib membawa helm sendiri (tidak boleh menggunakan helm bekas penumpang lain), mengenakan masker, membawa *hand sanitizer* (naik dan turun motor cuci tangan) dan melakukan pembayaran secara non tunai.



Dari sisi pengemudi juga harus siap membawa termometer agar penumpang dapat diperiksa suhunya sebelum ikut mengendarai OJOL serta wajib melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Untuk memastikan berjalannya aturan baru tersebut, maka harus didukung pula dengan penerapan sanksi yang disertai dengan kesiapan aparat menegakkan aturan tersebut.

“Ada aturan maka perlu ada sanksi. Sehingga penerapan aturan akan maksimal di lapangan,” ujar Syaikhul.

Sementara itu, bagi daerah yang masih diwajibkan melaksanakan PSBB, maka masih berlaku Permenkes no.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. OJOL hanya dapat melakukan kegiatan pengantaran barang. Sebab berdasarkan aturan ini pada daerah dengan kondisi PSBB, maka moda transportasi baik umum maupun pribadi dibatasi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, sehingga tidak memungkinkan bagi OJOL untuk membawa penumpang.

Rencana “New Normal” memang sudah tak terhindarkan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, misalnya, telah menerbitkan Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman dari Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. SE ini memang berlaku khusus internal ASN.

Syaikhu sendiri memandang kondisi “New Normal” merupakan tahapan yang dapat diterapkan, namun dengan persyaratan yang ketat sesuai kriteria dari WHO. Kondisi ini paling tidak berlangsung hingga ditemukan vaksin.

Penerapan kondisi “New Normal” ini harus tetap mengutamakan aspek kesehatan dan pemerintah tidak boleh lengah.

“Pemerintah harus tetap mengusahakan uji kesehatan sebanyak-banyaknya agar dapat mengidentifikasi orang-orang yang telah terpapar virus Covid-19,” tegas Syaikhu. •

Link Berita:

1. <https://infobekasi.co.id/2020/06/01/pks-new-normal-ojol-boleh-bawa-penumpang-dengan-protokol-kesehatan/>
2. <http://jurnalbabel.com/2020/06/mendesak-perbolehkan-ojol-angkut-penumpang-saat-new-normal/>
3. <https://radarbekasi.id/2020/06/02/ini-kata-anggota-dpr-ri-soal-new-normal-terkait-ojol/>
4. <http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-roya/ekonomi-dan-bisnis/7321-pks-new-normal-ojol-boleh-bawa-penumpang-dengan-protokol-kesehatan>
5. <https://www.lintasparlemen.com/new-normal-ojol-boleh-bawa-penumpang-dengan-protokol-kesehatan/>
6. <https://kicaunews.com/2020/06/02/pks-new-normal-ojol-boleh-bawa-penumpang-dengan-protokol-kesehatan/>
7. <http://www.transparannews.com/politik/pks-new-normal-ojol-boleh-bawa-penumpang-dengan-protokol-kesehatan/>
8. <http://inionline.id/2020/06/pks-new-normal-ojol-boleh-bawa-penumpang-dengan-protokol-kesehatan/>
9. <https://radaraktual.com/38765/pks-minta-pemerintah-izinkan-ojol-bawa-penumpang-saat-new-normal.html>
10. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/06/pks-ojol-boleh-bawa-penumpang-dengan.html>
11. <https://depoktoday.com/new-normal-politisi-pks-ini-dukung-pengemudi-ojek-bawa-penumpang/>
12. <https://www.radardepok.com/2020/06/perlu-ada-standarisasi-kerja-ojol-di-new-normal/>
13. <http://www.jurnalbandung.com/pks-new-normal-ojol-boleh-bawa-penumpang-dengan-protokol-kesehatan/>
14. <https://www.vivanews.com/amp/berita/nasional/51027-kebijakan-new-normal-pengemudi-ojek-diusulkan-kembali-bawa-penumpang?medium=headline-berita-amp-vivanews>

15. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200602/98/1247404/dpr-segera-siapkan-aturan-ojol-bawa-penumpang-di-masa-new-normal>
16. <http://www.teropongsenayan.com/113262-pemerintah-didesak-perbolehkan-ojol-angkut-penumpang-di-era-new-normal>
17. <https://rilis.id/new-normal-dpr-minta-ojol-dibolehkan-bawa-penumpang>
18. <http://www.harnas.co/2020/06/02/ojek-daring-perlu-aturan-baru>
19. <https://m.suarakarya.id/detail/112154/New-Normal-PKS-Dorong-Ojol-Bawa-Penumpang-Protokol-Covid-19>
20. <https://liputan.co.id/2020/06/komisi-v-dpr-minta-pemerintah-izinkan-ojol-bawa-penumpang-saat-new-normal/>
21. <https://tvberita.co.id/news/new-normal-ojol-boleh-bawa-penumpang-dengan-protokol-kesehatan/>

Kemenhub Hapus Batasan 50% Jumlah Penumpang, Syaikh: Wabah Covid-19 Belum Selesai!

PENGHAPUSAN BATASAN jumlah penumpang oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selama pandemi, mendapat kritikan dari Ahmad Syaikh. Anggota F-PKS DPR RI itu mengingatkan, wabah Covid-19 belum selesai yang dibuktikan dengan grafik yang belum melandai.

“Saya ingatkan kepada Kemenhub, wabah ini belum selesai. Grafik belum juga melandai. Jangan hapus batasan jumlah penumpang,” tegas Syaikh.

Anggota Komisi V itu memaparkan, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia setiap hari terus meningkat. Bahkan penambahan jumlah kasus baru masih pada kisaran 700-900 kasus per harinya.

Hari ini, Selasa (9/6) saja, tercatat rekor kasus baru, yaitu sebesar 1.043 kasus dalam sehari. Di sisi lain angka kesembuhan masih sekitar 500 kasus per harinya. Sehingga saat ini Indonesia masih “surplus” kasus Covid-19, dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan yang signifikan.

“Angka-angka ini secara jelas menunjukkan pandemi terus berlangsung. Tidak ada penurunan kasus,”



H. Ahmad Syaikh
Anggota Komisi V DPR RI

Kemenhub Hapus Batasan 50% Jumlah Penumpang

Syaikh: Wabah Covid-19 Belum Selesai!

Terbitnya Permenhub No.41 Tahun 2020 sungguh mengherankan. Karena didasari adanya keinginan Pemerintah untuk mengendalikan transportasi dalam rangka menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru, menuju masyarakat produktif dan aman Covid19, dengan tetap menekan penyebaran Covid19.

Fraksi PKS DPR RI fraksi.pksdprri @fpksdprri fraksi.pks.id

ujar Syaikh.

Ironisnya, kampanye ‘New Normal’ terus digaungkan dan dijalankan pemerintah. Salah satunya dengan menerbitkan Permenhub No.41 Tahun 2020 yang merevisi Permenhub No.18 Tahun 2020.

Terbitnya Permenhub No.41 Tahun 2020 sungguh mengherankan. Karena didasari adanya keinginan Pemerintah untuk mengendalikan transportasi dalam rangka menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru,

menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, dengan tetap menekan penyebaran Covid-19.

Namun aturan yang muncul justru berupa pelonggaran. Dan pasal yang dilonggarkan adalah terkait pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimana seluruh pasal yang memuat aturan besaran pembatasan jumlah penumpang, sekarang dihapuskan. Padahal dalam kondisi dibatasi saja, jumlah penderita Covid-19 masih terus meningkat. Tak terbayangkan jika terjadi pelonggaran.

“Kita patut khawatir. Dibatasi saja kasus masih bertambah, apalagi jika besaran jumlah penumpang dihapuskan,” lanjut Syaikh.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu memberi contoh kasus adanya dua penumpang pesawat yang lolos pemeriksaan dari Jakarta. Keduanya dinyatakan negatif Covid-19. Namun ketika tiba di tujuan, yakni Padang, keduanya dinyatakan positif Covid-19.

“Kasus ini berpotensi akan banyak terjadi ketika batasan jumlah penumpang dihapus,” jelas Syaikh.

Seharusnya, tambah Syaikh, Kementerian Perhubungan menahan diri dari menerbitkan aturan yang kontra produktif terhadap upaya penghentian wabah Covid-19 ini. Selama adaptasi ‘New Normal’, seharusnya aturan-aturan yang mendukung terciptanya *physical distancing* tetap diterapkan. Apabila telah terbukti efektif dalam menekan dan menurunkan jumlah penderita

Covid19, maka pelonggaran dapat diterapkan.

Jika pelonggaran ini diterapkan sekarang, disaat masih terjadinya peningkatan jumlah penderita Covid-19, dikhawatirkan yang terjadi adalah “Old Normal”. Yaitu terus meningkatnya penderita Covid-19 yang sesuai fitrahnya (kenormalannya) akan terus meningkat jika aspek *physical distancing* diabaikan.

Karena itu, secara tegas, Syaikh meminta Kemenhub membatalkan Permenhub No.41 Tahun 2020. Selain itu juga, sepatutnya Kemenhub melakukan konsultasi dengan sektor lain, seperti kesehatan, asosiasi dokter dan sebagainya. Tujuannya untuk meminta masukan terkait pengendalian transportasi di masa adaptasi ‘New Normal’ ini, agar dapat mengeluarkan aturan yang tidak kontraproduktif terhadap upaya penghentian wabah Covid-19 ini.

“Batalkan kebijakan ini. Keluarkan peraturan yang tidak kontra produktif. Jangan sepelekan nyawa rakyat,” tegas Syaikh. •

Link Berita:

1. <http://ahmadsyaikh.com/2020/06/10/kemenhub-hapus-batasan-50-jumlah-penumpang-syaikh-wabah-covid-19-belum-selesai/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/06/10/kemenhub-hapus-batasan-50-jumlah-penumpang-syaikh-wabah-covid-19-belum-selesai/>
3. https://kumparan.com/kumparannews/kemenhub-diminta-cabut-permenhub-41-2020-jangan-sepelekan-nyawa-rakyat-1taH5YfWIUK?utm_source=kumApp&utm_campaign=share&shareID=37dZ7sQd7gAc

4. <http://inionline.id/2020/06/kemenhub-hapus-batasan-50-jumlah-penumpang-syaikhu-wabah-covid-19-belum-selesai/>
5. <https://teropongindonesia.com/2020/06/ahmad-syaikhu-kritisi-kemenhub-soal-penghapusan-batasan-jumlah-penumpang/>
6. <https://bekasiguide.com/2020/06/10/kemenhub-hapus-batasan-50-jumlah-penumpang-syaikhu-wabah-covid-19-belum-selesai/>
7. <http://jurnalbabel.com/2020/06/dpr-kritik-kemenhub-hapus-batasan-50-jumlah-penumpang/>
8. Kemenhub Hapus Batasan 50 Jumlah Penumpang, Syaikhu Heran, Padahal Wabah Covid-19 Belum Selesai! <https://kicaunews.com/2020/06/10/kemenhub-hapus-batasan-50-jumlah-penumpang-syaikhu-heran-padahal-wabah-covid-19-belum-selesai/>
9. <https://radarbekasi.id/2020/06/10/wabah-covid-19-belum-selesai/>
10. <https://beritapublik.co.id/2020/06/10/ahmad-syaikhu-kritik-kemenhub-terkait-penghapusan-batasan-jumlah-penumpang/>
11. <https://m.jabarnews.com/read/86565/kemenhub-hapus-batasan-50-jumlah-penumpang-syaikhu-ingatkan-hal-ini>
12. <https://kesatu.co/syaikhu-kritisi-penghapusan-batasan-50-persen-jumlah-penumpang-oleh-kemenhub/>
13. <http://aksi.id/artikel/55967/Kemenhub-Hapus-Batasan-50-Jumlah-Penumpang-Syaikhu-Wabah-Covid-19-Belum-Selesai/#.XuDrnP1QYsg.whatsapp>
14. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/06/10/kemenhub-hapus-batasan-50-jumlah-penumpang-syaikhu-wabah-covid-19-belum-selesai/>
15. <http://spiritnews.co.id/2020/06/10/syaikhu-pandemi-covid-19-belum-selesai-kemenhub-jangan-hapus-pematasan-penumpang/>
16. <https://www.demokrasi.co.id/2020/06/penghapusan-batas-jumlah-penumpang-dpr.html?m=1>
17. <https://liputan.co.id/2020/06/ahmad-syaikhu-kritik-penghapusan-batas-penumpang-oleh-kemenhub/>
18. <https://news.kotatansel.com/2020/06/11/syaikhu-ingatkan-kemenhub-wabah-covid-19-belum-selesai/>
19. <https://infobekasi.co.id/2020/06/10/kemenhub-hapus-batasan-50-jumlah-penumpang-syaikhu-wabah-covid-19-belum-selesai/>

BPKP Berusia 37 Tahun, Syaikhu: Optimalkan Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19

AHMAD SYAIKHU BERHARAP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) optimal dalam melakukan pengawasan anggaran penanganan Covid-19. Harapan itu disampaikan Syaikhu terkait dengan usia lembaga tersebut yang ke-37 tahun.

Syaikhu yang merupakan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) itu menyatakan, optimalisasi BPKP menjadi tantangan tersendiri di tengah pandemi Corona saat ini.

“Ini jadi tantangan BPKP. Secara kelembagaan mereka harus melakukan pengawasan yang optimal terkait upaya penanganan Covid-19,” ujar Syaikhu.

Politisi PKS itu melanjutkan, fungsi pengawasan BPKP harus dioptimalkan agar penyimpangan anggaran penanganan Covid-19 bisa dikurangi.

“Jumlah anggarannya sangat besar. BPKP harus optimal lakukan pengawasan,” lanjut Syaikhu.

Syaikhu juga meminta BPKP pro aktif. Sebab, dalam Pasal 27 ayat 2 Perppu No.1 Tahun 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa sejumlah pejabat yang melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun



H. Ahmad Syaikh
Wakil Ketua BAKN DPR RI

Dirgahayu 37 Tahun BPKP

Syaikh: Optimalkan Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19

BPKP harus proaktif melakukan pengawasan, Sebab, dalam Pasal 27 ayat 2 Perppu No.1 Tahun 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa sejumlah pejabat yang melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Foto dpr.go.id | Fraksi PKS DPR RI | fraksipksdprri | @fksdprri | fraksi.pks.id

2020 tak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang dimaksud, yakni anggota, sekretaris, anggota sekretariat KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lain-

nya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

“BPKP harus proaktif melakukan pengawasan” harap Syaikh.

Tak lupa, mantan Wakil Walikota Bekasi itu mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPKP.

“Dirgahayu BPKP ke-37, semoga semakin profesional,” pungkasnya. •



“Ini jadi tantangan BPKP. Secara kelembagaan mereka harus melakukan pengawasan yang optimal terkait upaya penanganan Covid-19,” ujar Syaikh.

Link Berita:

1. <http://pks.id/content/bpkp-berusia-37-tahun-syaikhu-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/05/29/dirgahayu-37-tahun-bpkp-syaikhu-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19/>
3. <https://www.liputan6.com/news/read/4266386/dana-penanganan-covid-19-besar-bpkp-diminta-optimalkan-pengawasan>
4. <https://radarbekasi.id/2020/05/29/syaikhu-bpkp-sudah-37-tahun-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19/>
5. <https://www.wartakini.co/2020/05/bpkp-berusia-37-tahun-syaikhu-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19/>
6. <http://zonapantau.com/2020/05/29/bpkp-berusia-37-tahun-syaikhu-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19/>
7. <https://bekasiguide.com/2020/05/29/syaikhu-37-tahun-bpkp-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19/>
8. <https://www.radarnusantara.com/2020/05/bpkp-berusia-37-tahun-syaikhu.html>
9. <http://www.transparannews.com/politik/bpkp-berusia-37-tahun-syaikhu-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19/>
10. <https://beritapublik.co.id/2020/05/29/37-tahun-bpkp-syaikhu-harapkan-optimalkan-pengawasan-penanganan-covid/>
11. <http://aksi.id/artikel/55634/37-Tahun-BPKP-Syaikhu-Optimalkan-Pengawasan-Anggaran-Penanganan-Covid-19/#.XtDNNQqdQqA.whatsapp>
12. <http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-roya/7307-bpkp-berusia-37-tahun-syaikhu-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19>

13. <https://beritapublik.co.id/2020/05/29/37-tahun-bpkp-saikhu-harapkan-optimalkan-pengawasan-penanganan-covid/>
14. <https://teropongindonesia.com/2020/05/syaikhu-berharap-bpkp-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19/>
15. <https://infobekasi.co.id/2020/05/29/bpkp-berusia-37-tahun-syaikhu-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19/>
16. <https://kicaunews.com/2020/05/29/syaikhu-ingatkan-bpkp-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19/>
17. <http://www.jurnalbandung.com/bpkp-berusia-37-tahun-syaikhu-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19/>
18. <https://jurnalpriangan.com/2020/05/bpkp-berusia-37-tahun-syaikhu-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19/>
19. <https://www.radarcirebon.com/2020/05/29/bpkp-mesti-optimal-awasi-anggaran-covid-19/>
20. <https://jurnalciayumajakuning.com/2020/05/29/ahmad-syaikhu-usia-bpkp-37-tahun-pengawasan-anggaran-covid-19-harus-optimal/>
21. <https://www.liputan6.com/news/read/4266386/dana-penanganan-covid-19-besar-bpkp-diminta-optimalkan-pengawasan>
22. <http://dakta.com/news/24676/37-tahun-bpkp-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19>
23. <https://m.suarakarya.id/detail/112005/Syaikhu-Harapkan-BPKP-Optimalkan-Pengawasan-Anggaran-Penanganan-Covid-19>
24. <https://koransidak.com/hut-bpkp-yang-ke-37-tahun-syaikhu-bpkp-harus-optimal-lakukan-pengawasan/>
25. <https://www.telusurnews.com/bpkp-berusia-37-tahun-syaikhu-optimalkan-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19/>

Syaikhu: PP TAPER A Jadi Beban Baru Rakyat di Tengah Pandemi Corona

ANGGOTA DPR RI, Ahmad Syaikhu, menyoroti lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPER A). Menurutnya, PP ini hanya jadi beban baru rakyat saat pandemi Corona masih terjadi.

“Kita sangat terkejut. Di tengah pandemi Corona kehadiran Tapera sudah pasti jadi beban baru rakyat. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” kata politisi PKS itu.

Syaikhu menyinggung prediksi Bank Dunia soal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diperkirakan, tahun ini sebesar 0%. Asumsi didasarkan atas dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berlangsung selama dua bulan dan masih berlanjut. Beberapa komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi, seperti konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar pertumbuhan ekonomi misalnya, diperkirakan melambat seiring adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Harusnya dengan bercermin dari kondisi ini, PP TAPER A tak perlu dihadirkan. Niat dan tujuannya baik. Tapi waktunya sangat tidak tepat,” ujar Syaikhu yang duduk di Komisi V DPR RI.



Syaikh mengingatkan tentang iuran BPJS yang baru saja naik. Belakangan publik di media sosial juga mempertanyakan kenaikan tarif listrik.

“Lalu kini rakyat diwajibkan menyisihkan gajinya dengan besaran 2,5 persen. Tak terbayangkan betapa nestapanya hidup rakyat,” ungkap Syaikh.

PP No.25 Tahun 2020 tentang TAPERA ini merupakan amanah UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. UU tersebut dilahirkan untuk

membantu pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan papannya. Selama hampir empat tahun, amanah UU tersebut diabaikan (seharusnya paling lambat Maret 2018 PP sudah terbit). Namun, tiba-tiba muncul pada tahun 2020 pada saat terjadi pandemi corona.

Peserta BP TAPERERA adalah calon PNS, aparatur sipil negara (ASN), prajurit dan siswa Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta, dan pekerja apa pun yang menerima upah. Jumlah simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Demikian “ bunyi pasal 15 ayat 1 PP 25 Tahun 2020.

Skema TAPERERA mengambil iuran dari pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja menanggung 0,5 persen sementara pekerja 2,5 persen dari total gaji pegawai. Tabungan itu maksimal dibayar tanggal 10 setiap bulan. Kepesertaan TAPERERA berakhir jika pekerja memasuki masa pensiun; mencapai usia 58 tahun (syarat khusus bagi peserta mandiri); peserta meninggal dunia; atau peserta tidak memenuhi kriteria sebagai peserta 5 tahun berturut-turut.

Peserta yang sudah berakhir masa kepesertaannya dapat memperoleh pengembalian simpanannya serta hasil pemupukannya yang bisa berupa deposito per-

bankan, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga di bidang perumahan, atau bentuk investasi lain yang aman. Simpanan dan hasil pemupukannya wajib diberikan paling lama tiga bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir.

Hadirnya PP TAPERA ini juga memunculkan kecurigaan publik. Ada kesan, pemerintah berusaha mencari sumber dana talangan baru, di tengah sulitnya kondisi keuangan negara.

Ini bisa terlihat di Pasal 27 PP Tapera. Dijelaskan, dana iuran dapat diinvestasikan ke surat utang pemerintah. Ini artinya, pekerja diminta secara tidak langsung iuran untuk beli SBN. Banyak pihak kemudian menafsirkan, ini dilakukan karena pemerintah sedang cari sumber pembiayaan baru di tengah pelebaran defisit anggaran.

“Kecurigaan itu semakin kuat, karena ada kebijakan pemerintah dalam penyediaan sumber pendanaan penanganan dampak Corona,” ujar Syaikhu.



Kecurigaan itu semakin kuat, karena ada kebijakan pemerintah dalam penyediaan sumber pendanaan penanganan dampak Corona

Hal itu bisa dilihat melalui penerbitan surat utang negara (SUN) seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) f Perppu 1/2020 yang sudah menjadi UU. Dan juga pada Pasal 2 ayat (1) e pada perppu yang sama, yang pada intinya mengatakan bahwa sumber-sumber dana abadi dapat digunakan untuk pendanaan stimulus pemulihan ekonomi usai pandemi Corona.

Berdasarkan simulasi perhitungan Real Estate Indonesia (REI), dengan membayar premi 3 persen dari penghasilan, akan terkumpul dana hingga Rp 134 triliun. Angka ini diperoleh dengan asumsi peserta TAPERA diperkirakan mencapai 90 juta. Sedangkan hitungan pemerintah, dengan jumlah tabungan sebesar 3 persen, maka dana TAPERA yang dapat dikumpulkan per tahun mencapai angka Rp 71 triliun. Sebuah angka yang sangat besar.

“Potensi dana rakyat hanya untuk jadi dana talangan sangat terbuka lebar,” kata Syaikhulagi.

Menurut mantan Wakil Walikota Bekasi itu, TAPERA ini perlu dikritisi.

1. Peraturan ini sudah sekitar empat tahun terkesan diabaikan. Bukti pemerintah sebenarnya tidak serius membangun rumah untuk rakyat. Kesan untuk mendapatkan dana talangan justru terlihat jelas, akibat penerimaan pemerintah yang anjlok dan defisit APBN yang kian melebar.
2. PP TAPERA ini hadir pada saat yang tidak tepat. Fokus pemerintah harusnya pada pangan. Sebab,

pandemi ini berpotensi melahirkan krisis ketahanan pangan.

3. Potensi menurunkan pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi belanja masyarakat.
4. Angka 3% yang dibebankan kepada pemberi kerja dan pekerja, tergolong besar. Untuk pekerja, besaran iuran harusnya tidak flat, tapi tergantung nominal gaji.

Semua catatan ini, lanjut Syaikh, bukan berarti tidak setuju terhadap program rumah untuk rakyat. Karena sesuai data per Maret 2019, *backlog* kebutuhan perumahan masih sebesar 7,6 juta unit. Kebutuhan papan merupakan sesuatu yang sangat penting. Tapi melihat semua catatan di atas, Pemerintah harus sensitif.

“Hari ini, rakyat terhimpit kehidupannya. Cari makan kian susah. Pemerintah harus sensitif dengan penderitaan rakyatnya sendiri.” pungkas Syaikh. •

Link Berita:

1. <https://fraksi.pks.id/2020/06/06/syaikhu-pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona/>
2. <https://infobekasi.co.id/2020/06/06/syaikhu-pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona/>
3. <http://www.dakta.com/news/24759/syaikhu-pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona>
4. <https://teropongindonesia.com/2020/06/syaikhu-pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona/>
5. <http://www.transparannews.com/politik/syaikhu-pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona/>
6. <http://jurnalbabel.com/2020/06/tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona/>
7. <http://inionline.id/2020/06/pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona/>
8. <https://beritaradar.com/2020/06/06/pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona-ini-paparan-syaikhu/>
9. <https://www.rakyatcirebon.id/syaikhu-pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona-20200606.html>
10. <http://aksi.id/artikel/55873/Syaikhu-PP-Tapera-Jadi-Beban-Baru-Rakyat-di-Tengah-Pandemi-Corona/#.XtuDZDkqkM4.whatsapp>
11. <https://bekasiguide.com/2020/06/06/syaikhu-pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona/>
12. <http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-raya/7335-ahmad-syaikhu-pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-coron>
13. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/06/pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di.html>
14. <https://radarbekasi.id/2020/06/06/syaikhu-pp-tapera-beban-baru-rakyat-saat-pandemi-covid-19/>

15. <https://www.skumetropolitan.com/2020/06/syaikhu-pp-tapera-jadi-beban-baru.html>
16. <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-16396367/anggota-dpr-ini-sebut-jokowi-tidak-sensitif-soal-tapera-yang-memungut-3-persen-gaji>
17. <https://rmco.id/baca-berita/nasional/37339/pp-tapera-disahkan-bagai-petir-di-siang-bolong-netizen-banyak-yang-nolak>
18. <https://news.kotatangsel.com/2020/06/07/syaikhu-kritisi-pp-tapera-hanya-jadi-beban-baru-bagi-rakyat-di-tengah-pandemi-corona/>
19. <https://kicaunews.com/2020/06/07/syaikhu-pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona/>
20. <https://radarbekasi.id/2020/06/08/ketika-tapera-jadi-beban-baru-rakyat/>
21. <https://liputan.co.id/2020/06/rakyat-kian-susah-cari-makan-politikus-pks-kritik-pp-tapera-hadir-di-saat-pandemi/>
22. <https://tvberita.co.id/news/pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona/>
23. <https://microsite.suara.com/dpr/2020/06/09/103536/tapera-dinilai-jadi-beban-baru-rakyat-di-masa-pandemi>
24. <https://m.akurat.co/1135921/pp-tapera-malah-jadi-beban-baru-rakyat-di-masa-pandemi>

Syaikhu Kritik Pembebasan Lahan Bendungan Ibu Kota Negara: Setop, Rakyat sedang Susah!

RENCANA PEMERINTAH membebaskan lahan untuk lokasi pembangunan bendungan Ibu Kota Negara (IKN) mendapat kritik tajam dari Ahmad Syaikhu. Anggota Komisi V DPR RI itu mendesak pemerintah untuk menghentikan karena rakyat sedang susah.

“Setop, kehidupan rakyat sedang susah ekonominya karena pandemi Corona. Empatilah pada rakyat,” tegas Syaikhu.

Politisi PKS itu merasa heran dengan kebijakan pemerintah. Di tengah wabah Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat, seharusnya pemerintah fokus pada kebijakan strategis yang bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.

“Saya sungguh heran. Kebijakan pemerintah sering tak berbanding lurus dengan kondisi rakyat saat ini,” ujar Syaikhu.

Seperti diketahui, pemerintah akan membebaskan lahan untuk membuat bendungan di IKN. Lokasinya di Sepaku-Semoi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bendungan

dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di IKN yang baru. Sejumlah wilayah yakni Desa Tengin Baru, Argomulyo serta Desa Sukomulyo masuk dalam proyek pembangunan bendungan seluas 378 hektare. Terdiri atas 36 hektare untuk tubuh bendungan dengan luas genangan 342 hektare. Kepala Desa Tengin Baru Ahmad Mauladin mengungkapkan, dia mendapatkan surat pemberitahuan dari tim pembebasan lahan bendungan bahwa tahapannya dimulai bulan Juni 2020.

Padahal, bulan April 2020 lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat menginstruksikan seluruh kegiatan lapangan ditunda selama pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada penundaan pembebasan lahan lokasi proyek pembangunan Bendungan Sepaku-Semioi. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp80 miliar untuk tubuh bendungan seluas 36 hektare di atas.

Bendungan Sepaku-Semioi sendiri tidak pernah disebutkan dalam APBN 2020 merupakan proyek ibu kota negara (IKN) yang baru, melainkan sebagai program pembangunan infrastruktur PUPR 2020-2024, bersama 59 unit bendungan lainnya.

Dalam raker dengan Komisi V DPR RI tanggal 21 April 2020, Menteri PUPR sendiri menyatakan tidak ada anggaran tahun 2020 ini untuk pembangunan IKN baru. Realokasi anggaran tahun 2020 terkait pandemi Covid-19 oleh KemenPUPR juga tidak pernah menyebutkan Bendungan Sepaku-Semioi.

Hal ini senada dengan pernyataan Menteri Keuangan



Sri Mulyani pada akhir Mei 2020 lalu bahwa tidak ada cadangan anggaran pada APBN 2021 untuk proyek IKN. Sebab pemerintah masih dalam tahap pemulihan usai ekonomi Indonesia dihantam pandemik Covid-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengatakan, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada 2020 tidak akan bisa diraih dan ekonomi Indonesia akan merosot signifikan. Dan Menkeu Sri Mulyani memprediksi pada skenario sangat berat, pertumbuhan

ekonomi Indonesia akan berada pada angka -0,4% yang dapat menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan.

“Ini kan jelas semuanya. Data dan fakta berbicara. Tapi mengapa pemerintah ngotot membebaskan lahan untuk bendungan. Darimana dananya?” Tanya Syaikh.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu mengingatkan pemerintah soal kebijakannya yang sering mencekik rakyat. Dari harga BBM yang tidak kunjung turun, menaikkan iuran BPJS, lalu terjadi kenaikan tagihan listrik yang membuat masyarakat gaduh, dan yang terakhir muncul kewajiban Tapera. Dengan semua beban yang ditanggung oleh rakyat tersebut, seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang bukan menjadikan rakyat semakin terhimpit.

IKN, tambah Syaikh, belum saatnya. Sebab tidak ada kepentingan mendesak. Di sisi lain, pemindahan IKN tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Penelitian INDEF mengatakan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Apa urgensinya memulai pembangunan bendungan IKN? Tidak ada. Bahkan IKN itu sendiri pada kondisi normal juga tidak penting,” ungkap Syaikh.

Perlu diketahui, proyek Bendungan Sepaku-Semai yang segera dilaksanakan ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 700 Miliar. Padahal uang sebanyak itu dapat digunakan untuk membantu 390 Ribu KK selama

tiga bulan. Masing-masing mendapatkan Rp 600 Ribu per bulan.

Karena itu, Syaikh mengingatkan pemerintah agar jangan melanjutkan rencana pembangunan bendungan terkait Ibukota baru tersebut. Syaikh juga mendorong pemerintah untuk membatalkan proyek pemindahan IKN, dan mengajak untuk kembali fokus pada penanganan Covid-19 saat ini beserta dampaknya.

Ini perlu dilakukan untuk memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap rakyat yang sedang dilanda bencana. Sedangkan dana yang tadinya direncanakan untuk pembangunan Ibukota baru, sebaiknya dialihkan guna membantu jutaan rumah tangga kurang mampu. Juga stimulus bagi UMKM selama masa pemulihan. Hal ini agar dana tersebut dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui pemberian stimulus tersebut.

“Sekali lagi, setop pembebasan lahan untuk bendungan. Bahkan hentikan rencana pemindahan IKN. Pemerintah sayang kepada rakyatnya yang sedang tercekik,” pungkas Syaikh. •

Link Berita:

1. <http://ahmadsyaikh.com/2020/06/11/syaikhu-kritik-pembebasan-lahan-bendungan-ibu-kota-negara-setop-rakyat-sedang-susah/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/06/11/kritik-pembebasan-lahan-bendungan-ibukota-negara-syaikhu-setop-rakyat-sedang-susah/>

3. <https://m.tribunnews.com/nasional/2020/06/13/pks-hentikan-pembebasan-lahan-lokasi-pembangunan-bendungan-ibu-kota-negara-rakyat-sedang-susah>
4. <http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-7347-syaikhu-kritik-pembebasan-lahan-bendungan-ibu-kota-negara-setop-rakyat-sedang-susah>
5. <http://jurnalbabel.com/2020/06/setop-pembebasan-lahan-bendungan-ibu-kota-negara-baru-rakyat-sedang-susah/>
6. <https://m.jabarnews.com/read/86606/syaikhu-stop-rencana-pembebasan-lahan-bendungan-ikn-rakyat-sedang-susah>
7. <https://www.mediagaruda.co.id/2020/06/11/syaikhu-kritik-pembebasan-lahan-bendungan-ibu-kota-negara-setop-rakyat-sedang-susah/>
8. <http://inionline.id/2020/06/syaikhu-kritik-pembebasan-lahan-bendungan-ibu-kota-negara-stop-rakyat-sedang-susah/>
9. <https://radarbekasi.id/2020/06/11/syaikhu-rakyat-lagi-sulit-setop-pembebasan-lahan-bendungan-ibu-kota-negara/>
10. <http://www.transparannews.com/politik/syaikhu-rakyat-sedang-susah-stop-pembebasan-lahan-bendungan-ibu-kota-negara/>
11. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/06/syaikhu-kritik-pembebasan-lahan.html>
12. <https://www.tagar.id/pks-tentang-proyek-bendungan-di-ibu-kota-negara-baru>
13. <https://kicaunews.com/2020/06/11/syaikhu-kritik-pembebasan-lahan-bendungan-ibu-kota-negara-setop-rakyat-sedang-susah/>
14. <https://news.kotatansel.com/2020/06/11/syaikhu-setop-pembangunan-bendungan-ikn-rakyat-sedang-susah/>
15. <https://kesatu.co/kritik-pembebasan-lahan-bendungan-ibu-kota-negara-syaikhu-setop-rakyat-sedang-susah/>
16. <http://www.teropongsenayan.com/113603-tak-masuk-program-anggaran-bendungan-ibukota-negara-untuk-apa#.XuMxYS717Cw.whatsapp>



PKS Bergerak Cepat Bantu Korban Banjir ROB Pesisir Karawang

KARAWANG-DPD PKS KABUPATEN KARAWANG, bergerak cepat dengan mendirikan dapur umum untuk membantu korban banjir ROB di Kecamatan Cibuya. Ratusan paket nasi sudah berhasil disampaikan kepada masyarakat terdampak.

Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang, Dedi Sudrajat mengatakan, abrasi atau banjir ROB di pesisir pantai utara Karawang ini memang perlu perhatian khusus. Perlu solusi yang tepat untuk menangani bencana alam ini.

“Sejak awal bencana dapur umum kami dan tempat pengungsian warga terdampak sudah berdiri dan penuh,” ujarnya, Sabtu (6/6/2020).

Hari ini, lanjut Dedi, Anggota Komisi V DPR RI dari PKS Ahmad Syaikhu, Fraksi PKS DPRD Karawang, Pengurus DPC PKS se-Dapil 3 (Cibuaya, Tirtajaya, Pedes, Pakis dan Tirtajaya), turun ke lokasi untuk meninjau dan menyalurkan bantuan di lokasi abrasi.

“Hari ini kami meninjau dapur umum dan tempat pengungsian 180 KK warga terdampak, di desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya, bersama dengan lurah dan aparat desa setempat, Tim TAGANA Karawang, petugas TNI Babinsa Cibuaya dan BPBD Karawang,” terangnya.

“Sampai tadi malam sudah lebih 700 nasi bungkus habis di dapur umum untuk warga terdampak Abrasi (ROB),” tandasnya. (red) •

1. <https://prasastijabar.co.id/pks-bergerak-cepat-bantu-korban-banjir-rob-pesisir-karawang/>

Kunjungi Korban Banjir Rob di Karawang, Syaikh: Pemda Harus Relokasi Warga

ANGGOTA DPR RI AHMAD SYAIKHU mengunjungi korban banjir di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuyaya, Karawang, Sabtu, (6/6). Selain memberikan bantuan sembako untuk dapur umum, Politisi PKS itu juga meminta Pemkab Karawang segera merelokasi warga.

“Ini harus segera relokasinya. Warga sudah sering mengalami banjir rob semacam ini,” ujar Syaikh.

Anggota Komisi V DPR RI itu berharap Pemkab Karawang cepat mengajukan usulan relokasi tersebut. Nantinya, Syaikh akan memperjuangkan usulan Rumah Layak Huni tersebut di DPR kepada Kementerian PUPR.

“Ajukan segera. Komisi saya kebetulan bermitra dengan Kementerian PUPR. Insya Allah siap saya perjuangkan,” ungkap Syaikh.

Dari dialog yang dilakukan dengan masyarakat, sebagian dari mereka sudah bersedia jika direlokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

“Sebagian masyarakat sudah bersedia. Pemkab harus segera menindaklanjuti,” harap Syaikh.

Dari hasil tinjauan di lapangan, Syaikh melihat rumah-rumah tersebut memang tidak layak. Posisi sebagian rumah langsung berada di bibir pantai.

BERITA FRAKSI

fraksi.pks.id | Sabtu 9 Juni 2020

fraksi.pks.id | @fraksi.pks | @fraksi.pks | fraksi.pks



Kunjungi Korban Banjir Rob di Karawang SyaiKHU: Pemda Harus Relokasi Warga

Sebagian masyarakat sudah bersedia. Pemkab harus segera menindaklanjuti

H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Komisi V DPR RI

Karawang (09/06) – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad SyaikhU mengunjungi korban banjir di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuya, Karawang, Sabtu, (09/06/2020).

Selain memberikan bantuan sembako untuk dapur umum, Politisi PKS itu juga meminta Pemkab Karawang segera merelokasi warga.

"Ini harus segera direlokasi. Warga sudah sering mengalami banjir rob semacam ini," ujar SyaikhU.

Anggota Komisi V DPR RI itu berharap Pemkab Karawang cepat mengajukan usulan relokasi tersebut. Nantinya, SyaikhU akan memperjuangkan usulan Rumah Layak Huni tersebut di DPR kepada Kementerian PUPR.

"Ajukan segera. Komisi

saya kebetulan bermitra dengan Kementerian PUPR. Insya Allah siap saya perjuangkan," ungkap SyaikhU.

Dari dialog yang dilakukan dengan masyarakat, sebagian dari mereka sudah bersedia jika direlokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

"Sebagian masyarakat sudah bersedia. Pemkab harus segera menindaklanjuti," harap SyaikhU.

Dari hasil turjunan di lapangan, SyaikhU melihat rumah-rumah tersebut memang tidak layak. Posisi sebagian rumah landung berada di bibir pantai.

Selain relokasi, upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan membuat pemecah gelombang, sehingga ombak

tidak langsung menerjang rumah. Juga dengan menghidupkan hutan mangrove.

Dampak banjir rob ini memang besar. Ada 206 KK dan 489 jiwa yang terdampak, 83 rumah rusak berat, 53 rusak sedang, dan 45 rusak ringan.

SyaikhU mengunjungi warga yang menjadi korban bersama Ketua Fraksi PKS DPRD Karawang Dedi Sudrajat, Anggota Komisi IV DPRD Karawang Maman Suherman, dan Pengurus DPC PKS se-Dapil 3 (Cibuya, Tirtajaya, Pedes, Pakis dan Tirtajaya), lurah dan aparat pemerintah setempat. Dalam kunjungan tersebut, SyaikhU memberikan bantuan sembako untuk keperluan dapur umum.

DPD PKS Kabupaten Karawang sejak awal sudah membuat dapur umum di lokasi pengungsian warga.

Sampai tadi malam sudah lebih 700 nasi bungkus habis di dapur umum untuk warga terdampak. Aresi (RDB), ujar Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang Dedi Sudrajat.



Selain relokasi, upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan membuat pemecah gelombang, sehingga ombak tidak langsung menerjang rumah. Juga dengan menghidupkan hutan mangrove.

Dampak banjir rob ini memang besar. Ada 206 KK dan 489 jiwa yang terdampak, 83 rumah rusak berat, 53 rusak sedang, dan 45 rusak ringan.

SyaikhU mengunjungi warga yang menjadi korban bersama Ketua Fraksi PKS DPRD Karawang Dedi Sudrajat, Anggota Komisi IV DPRD Karawang Maman Suherman, dan Pengurus DPC PKS se-Dapil 3 (Cibuya, Tirtajaya, Pedes, Pakis dan Tirtajaya), lurah dan apa-

ratur pemerintahan setempat. Dalam kunjungan tersebut, Syaikhu memberikan bantuan sembako untuk keperluan dapur umum.

DPD PKS Kabupaten Karawang sejak awal sudah membuat dapur umum di lokasi pengungsian warga.

“Sampai tadi malam sudah lebih 700 nasi bungkus habis di dapur umum untuk warga terdampak Abrasi (ROB),” ujar Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang Dedi Sudrajat. •



“Ajukan segera. Komisi saya kebetulan bermitra dengan Kementerian PUPR. Insha Allah siap saya perjuangkan,” ungkap Syaikhu.

Link Berita:

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/06/09/kunjungi-korban-banjir-rob-di-karawang-syaikhu-pemda-harus-relokasi-warga/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/06/09/kunjungi-korban-banjir-rob-di-karawang-syaikhu-pemda-harus-relokasi-warga/>
3. <https://bekasiguide.com/2020/06/09/kunjungi-korban-banjir-rob-di-karawang-syaikhu-pemda-harus-relokasi-warga/>

4. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/06/kunjungi-korban-banjir-rob-karawang.html>
5. <https://teropongindonesia.com/2020/06/kunjungi-korban-banjir-rob-di-karawang-syaikhu-pemda-harus-relokasi-warga/>
6. <https://www.wartakini.co/2020/06/kunjungi-korban-banjir-rob-di-karawang-syaikhu-pemda-harus-relokasi-warga/>
7. <http://aksi.id/artikel/55946/Kunjungi-Korban-Banjir-Rob-di-Karawang-Syaikhu-Desak-Pemda-Relokasi-Warga/#.Xt9BZqIT2A4.whatsapp>
8. <http://inionline.id/2020/06/kunjungi-korban-banjir-rob-di-karawang-syaikhu-pemda-harus-relokasi-warga/>
9. <https://kabartagar.com/kunjungi-korban-banjir-rob-di-karawang-syaikhu-pemda-harus-relokasi-warga/>
10. <http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-roya/nasional/7340-kunjungi-korban-banjir-rob-di-karawang-syaikhu-pemda-harus-relokasi-warga>
11. <http://www.transparannews.com/politik/kunjungi-korban-banjir-rob-di-karawang-syaikhu-pemda-harus-relokasi-warga/>
12. <https://radarbekasi.id/2020/06/09/anggota-dpr-ri-desak-pemkab-relokasi-warga-karawang-korban-banjir-rob/>
13. <https://kicaunews.com/2020/06/09/kunjungi-korban-banjir-rob-di-karawang-syaikhu-pemda-harus-relokasi-warga/>
14. <https://pilarrepublik.com/2020/06/09/anggota-dpr-ri-ahmad-syaikhu-kunjungi-korban-banjir-rob-di-karawang/>
15. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/06/kunjungi-korban-banjir-rob-karawang.html>
16. <http://spiritnews.co.id/2020/06/10/kunjungi-korban-banjir-rob-di-karawang-syaikhu-pemda-harus-relokasi-warga/>



Soal SIM Seumur Hidup, Ini Kata Anggota DPR RI

ANGGOTA DPR RI AHMAD SYAIKHU menyinggung Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup saat melakukan sosialisasi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ), Ahad (14/6) di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Syaikhu yang duduk di Komisi V DPR itu menyebut, dalam UU LLAJ tersebut ada beberapa pasal penting yang patut menjadi perhatian masyarakat pengguna jalan. “Ada pasal-pasal penting yang selama ini masih belum tersosialisasikan dengan baik. Padahal ini menyangkut keselamatan pengguna jalan,” ujar Syaikhu.

Ada pasal yang mengatur hak pejalan kaki atau pesepeda. Disebutkan tentang perlunya mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda. Aturan ini termaktub dalam pasal 284 jo Pasal 106 ayat (2). Jika melanggar, diberi denda: Rp 500.000.

Ada juga pasal 298 jo Pasal 121 ayat (1) tentang Berhenti dalam keadaan darurat. Jika tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, maka dikenakan denda Rp 500.000.

Lalu ada Pasal 283 jo Pasal 106 (1) soal Mengemudi tidak Wajar. Maksudnya adalah melakukan kegiatan lain saat mengemudi, dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Jika melanggar, diberi denda Rp750.000.

Kemudian pasal 296 jo Pasal 114 huruf (a) tentang Perlintasan Kereta Api. Disebutkan, mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain akan dikenakan denda Rp750.000.

Selanjutnya tentang kecepatan maksimum dan minimum. Jika melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah, diberi denda Rp500.000. Ini terdapat pada pasal 287 ayat(5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf (g) atau Pasal 115 huruf (a).

Terakhir, pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b soal SIM. Setiap pengemudi tidak membawa SIM, diberi sanksi denda Rp250.000. Sedangkan bagi yang tidak memiliki SIM, seperti diatur pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1), dikenakan denda Rp1.000.000.

Soal SIM ini, Syaikhul yang juga politisi PKS ini menyinggung janji kampanye PKS pada 2019 lalu. Dia memastikan, partainya terus memperjuangkan agar SIM

berlaku seumur hidup. Tidak hanya berlaku selama 5 tahun dan kemudian harus diperpanjang seperti diatur dalam pasal 85 UU LLAJ Tahun 2009.

“Ini janji kampanye kita. Dan Alhamdulillah terus diperjuangkan,” tegas Syaikh.

Sejauh ini, ungkap Syaikh, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Keahlian DPR RI saat membahas sejumlah prolegnas prioritas 2020 di Komisi V dan khusus UU terkait Transportasi dan Jalan yang telah masuk Prolegnas dan harus segera dibahas.

“PKS telah memberikan beberapa catatan kepada Badan Keahlian. Selanjutnya mereka akan melakukan kajian, lalu membuat Naskah Akademik (NA) dan draft RUU. Kemudian akan dibahas menjadi sebuah Daftar Isian Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang,” ungkap Syaikh.

Sedikitnya ada tiga hal penting poin soal SIM yang jadi sorotan PKS. *Pertama*, periodisasi SIM yang singkat, yakni hanya 5 tahun. “PKS berpendapat, khusus SIM C (Kendaraan roda 2), usia SIM bisa lebih panjang, atau bahkan seumur hidup,” kata Syaikh.

Kedua, soal nilai pendapatan negara. *Ketiga*, perbandingan dengan negara lain, seputar LLAJ. “Dari ketiga hal tersebut yang menjadi sorotan kita soal SIM. Badan Keahlian akan mengkajinya dan memberikan tawaran rumusan aturan dalam bentuk RUU,” tegasnya. •

1. <https://radarbekasi.id/2020/06/15/soal-sim-seumur-hidup-ini-kata-anggota-dpr-ri/>



Anggota DPR Upayakan SIM Berlaku Seumur Hidup

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Komisi Transportasi (Komisi V) DPR tengah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ). RUU usulan DPR ini sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

Anggota Komisi V DPR, Ahmad Syaikhul Jabbar, mengatakan RUU tersebut nantinya akan merubah Surat Izin Mengemudi (SIM) yang awalnya hanya berlaku lima tahun, menjadi berlaku seumur hidup.

“Saya ingin mendorong sebagaimana janji kampanye PKS bahwa untuk SIM, kita akan upayakan itu bisa diperjuangkan menjadi SIM seumur hidup,” kata Ahmad Syaikh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2020.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini memandang masyarakat sudah mendapatkan SIM serta berkendara secara rutin. Hal itu mengindikasikan bahwa mereka semakin ahli dalam berkendara. Sehingga, menurutnya, pihak Kepolisian tidak perlu lagi memberlakukan pengecekan keahlian berkendara melalui berbagai tes dengan memperpanjang masa berlaku SIM.

“Orang setelah dia bisa mengendarai maka semakin hari dia banyak mengendarai, dia semakin ahli,” ujarnya.

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini menuturkan SIM seumur hidup ini ada pengecualian bagi orang yang organ tubuhnya cacat atau tidak berfungsi akibat mengalami kecelakaan. Misalnya, penglihatannya tak lagi berfungsi karena efek kecelakaan sehingga ia dipastikan tak lagi bisa mengemudi.

Contoh lain dari efek kecelakaan, kaki atau tangan yang sudah tidak kuat menginjak/menekan rem dan perangkat kemudi lainnya.

Selain itu, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini menyoroti adanya wacana pengalihan pengurusan SIM, STNK, BPKB dari Kepolisian ke Kementerian Perhubungan (Kemhub). Menurutya, di beberapa negara ada yang diserahkan ke Kepolisian

dan ada juga yang diserahkan ke Perhubungan.

“Yang jelas menurut saya bagaimana profesionalitas dalam penanganan. Ketika proses di Kepolisian lebih profesional, lakukan itu. Yakin kan disana bisa dilakukan *good governance* (manajemen yang jujur, red) yang artinya untuk menekan tingkat korupsi dan sebagainya,” jelas dia.

Jika manajemen di Kepolisian mampu menghindari praktik kotor dalam penerbitan SIM, maka melanjutkan tugas itu tak menjadi masalah. Namun jika terbukti sebaliknya, Syaikhu menegaskan lebih baik penugasan penerbitan SIM dialihkan ke Kemenhub.

“Kalau tidak bisa dan perlu dilakukan perbaikan, perlu diserahkan ke Kemenhub. Saya yakin Kepolisian juga bisa asalkan perbaikan-perbaikan itu kan untuk kesempurnaan dan kenyamanan semua. Sekarang sudah mulai perbaikan melalui online segala macamnya,” tambahnya. •

Link Berita:

1. <http://www.teropongsenayan.com/114161-anggota-dpr-upayakan-sim-berlaku-seumur-hidup#.XvwbsWrCC-s.whatsapp>
2. <http://jurnalbabel.com/2020/06/revisi-uu-llaj-sim-berlaku-seumur-hidup/>




 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
 DIJALAN PERIKULIAHAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA

H. Ahmad Syaikh
 Wakil Ketua BAKN DPR RI

Rapat BAKN dengan YLKI,
 Organda dan MTI

**Syaikhu Tanyakan
 Efektifitas Subsidi
 Energi**

Apakah pola pemberian subsidi sudah efektif? Jika belum bagaimana reformulasi yang lebih tepat?. Subsidi energi berupa gas dan BBM, sebab di Indonesia, dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Bahkan, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp 246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan belanja di lebih 5 kementerian lembaga

Foto dpr.go.id | Fraksi PKS DPR RI | @fraksiaksdprri | @fpksdprri | fraksi.pks.id

Terjadi Anomali Subsidi, BAKN DPR RI Minta Masukan Pakar

JAKARTA – SUBSIDI MERUPAKAN instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan serta koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar di Indonesia.

Demikian juga halnya dengan kebijakan subsidi energi di Indonesia yang dalam satu dekade terakhir mencapai lebih dari Rp100 triliun setiap tahunnya. Bahkan menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikh, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai Rp246,5 triliun atau 2,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan belanja di lebih lima kementerian atau lembaga.

Untuk efektivitas dan memperbaiki kebijakan subsidi energi oleh pemerintah, maka BAKN DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar dan narasumber.

“Kebijakan subsidi harus tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin di Indonesia. Namun dalam praktiknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran kebijakan subsidi di Indonesia, yang justru keluar dari konteks proteksi terhadap kelompok masyarakat miskin. Manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya,” kata Syaikh, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Meski di satu sisi subsidi dipandang sebagai bantuan sosial, lanjut mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu, namun kebanyakan subsidi energi Indonesia lebih bersifat regresif, artinya hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat dari subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin.

“Pada saat yang sama, mekanisme harga tetap juga mendorong konsumsi energi yang boros dan sia-sia, di mana hanya memberikan sedikit insentif untuk meningkatkan efisiensi energi atau mengurangi emisi gas rumah kaca domestik, dan berkontribusi pula terhadap memburuknya neraca perdagangan Indonesia,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dalam RDPU, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan energi tidak hanya soal harga murah, namun juga harus menuju kemandirian energi. Karena itu, Enny mendorong adanya bauran energi dalam rangka meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

“Kebijakan subsidi mestinya diperuntukkan dan dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Akan tetapi subsidi energi di Indonesia saat ini masih belum tepat sasaran, karena porsi terbesarnya justru dinikmati oleh orang kaya. Selain itu, skema subsidi yang ada di Indonesia justru berpotensi dimanfaatkan para pemburu rente ekonomi atau sering disebut mafia,” ungkap Enny. •

Link Berita:

1. <http://ahmadsyaikhu.com/2020/07/02/memimpin-rapat-bakn-mengkaji-pengelolaan-subsidi-minyak-dan-gas/>
2. <https://fraksi.pks.id/2020/07/01/bakn-undang-pakar-bahas-kebijakan-subsidi-di-indonesia/>



Ojol Jihad di Jalanan, PKS Jihad di DPR Angkat Ojol Jadi Transportasi Umum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Komisi Transportasi (Komisi V) DPR tengah menyusun dan mendengarkan masukan dari para pakar terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ). RUU usulan DPR ini sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikh, mengungkapkan RUU tersebut akan membahas adanya usulan ojek online

(ojol) menjadi transportasi umum serta keberadaan sepeda yang saat ini ramai di jalan-jalan umum. Fraksi PKS di DPR pun, kata dia, akan “berjihad” memperjuangkan hal tersebut agar di atur dalam RUU LLAJ.

“Saya sepekat sepeda motor/ojol diatur, karena realitas Ojol sangat membantu masyarakat. Kita juga perjuangkan sepeda yang sekarang ramai, tetapi kurang mendapat perhatian dari kesediaan jalan,” kata Syaikhu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juni 2020.

Syaikhu menjelaskan, para pakar transportasi yang diundang Komisi V untuk diminta masukan terkait RUU ini juga tidak mempermasalahkan Ojol jadi kendaraan umum. Sepanjang masyarakat merasakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, maka sangat mungkin diatur dalam UU LLAJ.

“Kalau tidak diatur artinya dampaknya akan liar. Kalau diatur misalnya bagaimana cara mengendarai yang *safety* atau tes keselamatan penumpang termasuk helm, perlu di atur,” jelasnya.

Sementara untuk sepeda, Syaikhu mengatakan, saat ini sepeda berebut menggunakan jalan dengan kendaraan bermotor. Hal itu sangat rawan terjadi kecelakaan dan keselamatan pengguna sepeda sangat tinggi. “Ini tidak ada penghormatan di luar kendaraan bermotor,” ujarnya.

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini mengakui payung hukum terhadap keberadaan ojol dan sepeda

ini sudah ada atau akan diatur. Namun katanya payung hukumnya hanya sebatas Peraturan Menteri atau lainnya. Sehingga tidak kuat dari sisi hukumnya yang mudah diabaikan. Begitu juga peraturan itu tidak tersosialisasi secara masif.

“Tujuan UU ini kan bisa diterapkan konsisten. Ketika tujuan untuk menyelamatkan dan kenyamanan, saya kira harus diatur UU. Sehingga orang taat hukum karena pengaturannya lebih tinggi yakni UU. Selama ini diatur dalam tingkat menteri dan sebagainya, nampaknya tidak tersosialisasi secara masif,” pungkasnya. •



“Tujuan UU ini kan bisa diterapkan konsisten. Ketika tujuan untuk menyelamatkan dan kenyamanan, saya kira harus diatur UU.”

Link Berita:

1. <http://www.teropongsenayan.com/114172-ojol-jihad-di-jalanan-pks-jihad-di-dpr-angkat-ojol-jadi-transportasi-umum#.Xvwb0SGOPi4.whatsapp>
2. <http://jurnalbabel.com/2020/06/pks-perjuangkan-ojol-jadi-kendaraan-umum-dan-sepeda-di-atur-dalam-ruu-llaj/>



Temuan BPK Berpotensi Rugikan Negara, Syaikhul Pertanyakan Kinerja Tiga Kementerian

ANGGOTA DPR RI AHMAD SYAIKHU mempertanyakan kinerja tiga kementerian. Pasalnya, banyak temuan yang didapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi merugikan negara.

Tiga kementerian tersebut yakni, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Syaikhul menyampaikan itu dalam

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V tentang

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II Tahun 2019 BPK RI.

Di awal, Politisi PKS itu mengapresiasi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh ketiga Kementerian tersebut.

“Saya mengapresiasi raihan WTP dari BPK. Pada kementerian perhubungan dan Kementerian Desa PDTT opininya sudah ajeg dalam beberapa tahun. Mudah-mudahan kementerian PUPR ke depan bisa terus mempertahankan opini WTP. Terimakasih atas perjuangannya,” kata Syaikh di Gedung Parlemen, Senayan. Jakarta, Rabu, (15/7).

Tapi menurut Syaikh, ada beberapa temuan BPK yang perlu disoroti, karena menyangkut kinerja lembaga. Kepada Kementerian PUPR, Syaikh menyoroti revaluasi aset di atas Rp 5 Miliar, sehingga terjadi kenaikan aset di Kementerian PUPR dari Rp 915 Triliun menjadi Rp 1.896 T. Dengan kenaikan tersebut ada pajak yang harus dibayarkan oleh kementerian PUPR sebesar Rp 98,1 Triliun.

“Kenaikan aset setelah revaluasi ini sangat signifikan. Harusnya ada pajak yang dibayarkan Kementerian PUPR,” jelas Syaikh.

Kepada Kemendes dan PDTT, Syaikh berharap lembaga tersebut memperkuat sistem pengendalian intern untuk dapat menjamin keandalan proses administrasi.

Dia juga mempertanyakan kendala-kendala yang dihadapi oleh kementerian dalam menyelesaikan temuan. Sebab, temuan yang dapat dituntaskan baru 42,22%. Demikian pula dengan temuan tahun 2015 yang masih outstanding.

“Ini rendah sekali. Masih dibawah 50% tindak lanjut temuan BPK. Apa masalah dan kendalanya. Coba terbuka kepada kami,” kata Syaikh.

Kepada Kementerian Perhubungan, Syaikh mempertanyakan temuan strategis BPK, terkait dengan Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) atas kewajiban penerbitan SRUT pada APM 23 merek tahun 2017 sebanyak 5.987.772 unit kendaraan bermotor. Nilainya sebesar Rp 683.751.900.000. Per Juni 2020 jumlah rekapitulasi piutang yang telah terbayar baru 149.187.950.000 atau sebesar 21,82 %.

“Piutang yang terbayar sangat rendah. Padahal di saat pemerintah butuh dana, pemasukan PNBP ini harus digenjot seoptimal mungkin,” ujar Syaikh.

Syaikh juga menyoroti trend kenaikan jumlah temuan maupun nilainya dari semester I ke Semester II. Jumlah rekomendasi ada 1026, naik menjadi 1.049. Nilai rekomendasi juga naik dari Rp 2,31 Triliun menjadi Rp 2,99 Triliun. Artinya, ada akumulasi temuan yang belum ditindaklanjuti.

“Jika kondisi seperti ini terus menerus maka bisa dipastikan akumulasi temuan akan semakin besar. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Syaikh.

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya lima penyebab terjadinya temuan, yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, dan kelemahan sistem pengendalian intern.

“Temuan-temuan ini berpotensi untuk terjadinya kerugian negara. Harus secepatnya ditindaklanjuti,” pungkas Syaikh. •



“Temuan-temuan ini berpotensi untuk terjadinya kerugian negara. Harus secepatnya ditindaklanjuti,” pungkas Syaikh.

Link Berita:

1. <https://fraksi.pks.id/2020/07/16/banyak-temuan-bpk-syaikhu-pertanyakan-kinerja-tiga-kementerian/>
2. DPR RI Pertanyakan Kinerja Tiga Kementerian | Republika Online Mobile - <https://republika.co.id/berita/qdk850380/dpr-ri-pertanyakan-kinerja-tiga-kementerian>

3. Temuan BPK Berpotensi Rugikan Negara, Syaikh Pertanyakan Kinerja Tiga Kementerian - <https://www.jpnn.com/news/temuan-bpk-berpotensi-rugikan-negara-syaikh-pertanyakan-kinerja-tiga-kementerian>
4. Anggota DPR Soroti Temuan BPK di Tiga Kementerian - <https://www.beritasatu.com/nasional/656207-anggota-dpr-soroti-temuan-bpk-di-tiga-kementerian>
5. <https://jabarnews.com/read/88322/soal-temuan-bpk-ahmad-syaikh-pertanyakan-kinerja-tiga-kementerian>
6. <https://bekasiguide.com/202>
7. <https://radarbekasi.id/2020/07/16/syaikh-pertanyakan-kinerja-tiga-kementerian/>
8. Anggota DPR Ahmad Syaikh Soroti Kinerja 3 Kementerian: Temuan BPK, Berpotensi Rugikan Negara http://aksi.id/artikel/57292/Anggota-DPR-Ahmad-Syaikh-Soroti-Kinerja-3-Kementerian-Temuan-BPK-Berpotensi-Rugikan-Negara/#.XxAOQyS_0Xc.whatsapp
9. <http://jurnalbabel.com/2020/07/dpr-pertanyakan-kinerja-tiga-kementerian/>
10. <https://www.transparannews.com/politik/temuan-bpk-berpotensi-rugikan-negara-syaikh-pertanyakan-kinerja-tiga-kementerian/>
11. <http://inionline.id/2020/07/temuan-bpk-berpotensi-rugikan-negara-syaikh-pertanyakan-kinerja-tiga-kementerian/>
12. <http://www.radiosuarabekasi.com/berita-seputar-bekasi-roya/7388-temuan-bpk-berpotensi-rugikan-negara-syaikh-pertanyakan-kinerja-tiga-kementerian>
13. <https://bumnwatch.blogspot.com/2020/07/temuan-bpk-berpotensi-negara-syaikh.html>



AHMAD SYAIKHU dilahirkan di Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon pada 23 Januari 1965, putra kelima dari pasangan KH. Ma'soem bin Aboelkhair, dan Nafi'ah binti Thohir.

Pendidikan dasar sampai dengan kelas V dilaluinya di SDN Ciledug III. Seiring dengan kepindahan ayahnya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindanglaut Cirebon ia melanjutkan ke SDN Lemah Abang II hingga lulus. Pendidikan menengah pertama dilaluinya di SMPN Sindanglaut Cirebon dilanjutkan ke SMAN Sindanglaut Cirebon setelah itu dilanjutkan ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pendidikan agama diperolehnya dari orang tua, kakak, guru privat dan kiai-kiai di Pondok Pesantren Buntet Cirebon.

Setelah menyelesaikan pendidikan di STAN, ia menikah dengan teman sekampusnya, Lilik Wakhidah. Dari pernikahan itu Syaikhu dikaruniai tiga anak laki-laki (Muhammad Kamil, Muhammad Yasir Naufal dan Izzuddin Hamas) dan tiga anak perempuan (Sarah Karimah, Muthiah dan Aisyah Wafa Syahidah).

Saat ini Ahmad Syaikhu menduduki posisi sebagai Anggota DPR RI Komisi V dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya, ia sempat menjabat Wakil Walikota Bekasi untuk periode 2013-2018, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (2009-2019) dan DPRD Kota Bekasi (2004-2009) melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Masuk ke dunia politik berkonsekuensi ia harus mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kesibukan kerja tidak menghalanginya secara rutin ikut dalam kegiatan olahraga bulutangkis dan bersepeda.

Ia menilai bahwa era reformasi merupakan momentum untuk memperbaiki berbagai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Kunci keberhasilan untuk mewujudkan itu semua menurutnya adalah pengabdian, ketekunan dan kebersamaan. •

Catatan Harian **4**

Ahmad Syaikh

[MEI - JULI 2020]



Kehadiran buku Catatan Harian ke-4 karya sahabat saya, Ustadz Ahmad Syaikh ini sangat tepat momentumnya. Isi buku ini banyak menyoroti soal RUU HIP. Berisikan rangkaian gagasan, ide dan sikap tegas beliau.

Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA
Wakil Ketua MPR RI 2019-2024



Kehadiran buku ini yang merekam jejak aktivitas Wakil Rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk soal RUU HIP, akan semakin membuka tabir-dibalik isu ini. Buku ini betul-betul hadir di saat yang tepat.

H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D
Presiden PKS



Apa dan bagaimana sikap Fraksi PKS di parlemen dalam merespons isu, bisa tercermin di buku ini. Contoh soal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Saudara Ahmad Syaikh lewat buku ini secara gamblang menjelaskan posisi PKS. Runut dan sistematis. Juga berbasis argumentasi yang kuat.

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A
Ketua Fraksi PKS DPR RI 2019-2024

